



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN

LKJIP 2025

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan serta sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Penyusunan laporan ini juga menjadi sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan antara Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029, sehingga evaluasi kinerja disusun secara komprehensif untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, bahkan beberapa melampaui target, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan penguatan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, baik perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan Kota Balikpapan yang berkelanjutan.

Balikpapan, 27 Februari 2026
Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
Kota Balikpapan



Ir. Sri Wahjuningsih, M.AP.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memastikan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tahun 2025 merupakan masa transisi antara Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada kedua dokumen perencanaan tersebut.

Berdasarkan Renstra Tahun 2021–2026, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan secara umum mampu mencapai sebagian besar target sasaran yang telah ditetapkan. Pada sasaran strategis penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, indikator Persentase Penguatan Cadangan Pangan mencapai 12,61%. Pada sasaran strategis meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan aman, capaian indikator Tingkat Konsumsi Energi (AKE) sebesar 89,36%, Tingkat Konsumsi Protein (TKP) sebesar 111,05%, serta Persentase Keamanan Pangan sebesar 98,75%.

Pada sasaran strategis meningkatnya produksi sumber daya pangan, capaian indikator menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu produksi tanaman pangan sebesar 17.128 ton, hortikultura sebesar 57.321,24 ton, perkebunan sebesar 11.368,69 ton, peternakan sebesar 21.373,68 ton, serta perikanan sebesar 5.941,35 ton. Sementara itu, pada sasaran strategis meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi, indikator Nilai SAKIP Dinas mencapai 82,24 poin dan berhasil mempertahankan predikat A.

Seiring dengan masa transisi perencanaan, capaian kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029 juga disajikan sebagai gambaran awal implementasi dokumen perencanaan terbaru. Pada tujuan strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan, indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) menunjukkan realisasi sebesar 8,24 dengan capaian kinerja 68,81%. Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan inflasi pangan, fluktuasi harga komoditas strategis, serta

keterlambatan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, berbagai intervensi telah dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga, pemetaan wilayah rawan pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai realisasi 90,85 atau 104,01% dari target. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui edukasi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), kampanye diversifikasi pangan lokal, serta peningkatan kesadaran gizi. Selanjutnya, pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah mencapai 82,24 atau 100,66% dari target.

Total anggaran Tahun 2025 yang dialokasikan sebesar Rp30.499.997.750 (tiga puluh miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp26.337.556.211,04 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) atau 86,35%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, serta reformasi birokrasi.

Meskipun berbagai target telah tercapai, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan lahan pertanian dan perikanan, dampak perubahan iklim yang mempengaruhi produksi, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan akan memfokuskan pada peningkatan inovasi dan teknologi, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penguatan sinergi dengan sektor swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah serta menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	4
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. PERENCANAAN KERJA.....	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	29
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	37
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	48
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	48
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	53
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	178
BAB IV. PENUTUP	185
4.1 Kesimpulan	185
4.2 Tindak Lanjut.....	186

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 2025.....	7
Tabel 1.2 Jabatan dan Pendidikan Pegawai DPPP 2025.....	8
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029	18
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	20
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026.....	31
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029.	35
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	37
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026	38
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029	39
Tabel 2.9 Rencana Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025.....	41
Tabel 3.1 Rincian hasil evaluasi AKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan..	48
Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Atas Penilaian Tahun 2025.....	49
Tabel 3.3 Predikat Capaian Kinerja.....	54
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	56
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan	

Perikanan Tahun 2025-2029	58
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026.....	60
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir...	70
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026.....	73
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029.....	78
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	80
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	86
Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026.....	89
Tabel 3.13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029.....	143
Tabel 3.14 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra.....	161
Tabel 3.15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	174
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025.....	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.....	6
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Penguatan Cadangan Pangan dari tahun 2021-2025.....	62
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman dari tahun 2021-2025..	63
Gambar 3.3 Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dari Tahun 2021- 2025.....	65
Gambar 3.4 Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dari Tahun 2021- 2025.....	65
Gambar 3.5 Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan dari Tahun 2021- 2025.....	66
Gambar 3.6 Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Peternakan dari Tahun 2021- 2024.....	67
Gambar 3.7 Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Perikanan dari Tahun 2021- 2024.....	67
Gambar 3.8 Perbandingan Nilai SAKIP dari Tahun 2021- 2025.....	68
Gambar 3.9 Berita Acara Penetapan Penerima Paket CPPD Protein Kota Balikpapan Tahun 2025 nomr 400.9.12.1-137/DP3AKB-KK tanggal 28 Mei 2025.....	109
Gambar 3.10 Penyaluran CPPD Paket Protein (Ayam dan Telur) di 34 Kelurahan Kota Balikpapan.....	110
Gambar 3.11 Rapat koordinasi terkait pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).....	111
Gambar 3.12 Dokumentasi sosialisasi B2SA di sekolah sebagai upaya edukasi sejak usia dini dalam membentuk pola konsumsi pangan beragam dan bergizi.....	112
Gambar 3.13 Sosialisasi B2SA di Taman Bekapai yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Dinas Kesehatan melalui kegiatan Gempur Stunting.	113
Gambar 3.14 Sosialisasi B2SA bersama TP PKK Kelurahan Batu Ampar dalam rangka penguatan edukasi konsumsi pangan pada tingkat keluarga dan	

komunitas.	114
Gambar 3.15 Sosialisasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui Lomba B2SA yang dilaksanakan bekerja sama dengan TP PKK Kota Balikpapan	114
Gambar 3.16 Penandatanganan komitmen dukungan kebijakan edukasi konsumsi B2SA dan Stop Boros Pangan antara DPTP Provinsi dengan TP PKK Provinsi, Persit, Bhayangkari, serta organisasi mitra lainnya.....	115
Gambar 3.17 Kegiatan sosialisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka mendukung program Gempur Stunting.....	117
Gambar 3.18 Pengawasan keamanan pangan segar dan pengujian <i>rapid test</i> pada SPPG I, II, dan III wilayah Balikpapan Selatan	119
Gambar 3.19 Pengawasan keamanan pangan pada SPPG Polda Kalimantan Timur, SPPG 4, dan SPPG 5 wilayah Balikpapan Selatan.....	120
Gambar 3.20 Pendampingan dan penyuluhan budidaya tanaman pangan (padi, jagung, dan singkong) kepada kelompok tani.....	122
Gambar 3.21 Penyaluran bantuan benih jagung kepada kelompok tani.....	123
Gambar 3.22 Pengembangan hortikultura berbasis pekarangan dan urban farming sebagai upaya optimalisasi lahan di wilayah perkotaan.....	125
Gambar 3.23 Penyaluran sarana produksi berupa benih tanaman hortikultura kepada kelompok tani.	125
Gambar 3.24 Pelatihan dan pendampingan teknis budidaya hortikultura kepada masyarakat.....	126
Gambar 3.25 Pendampingan dan Gerakan Pengendalian OPT hortikultura di Kelurahan Manggar Baru dengan penggunaan bahan ramah lingkungan sebagai upaya menekan serangan hama dan penyakit tanaman.....	127
Gambar 3.26 Monitoring dan pemeliharaan tanaman buah tahunan dalam rangka menjaga keberlanjutan dan produktivitas jangka panjang.	128
Gambar 3.27 Monitoring dan pembinaan teknis kepada petani kebun kopi dan karet.....	129
Gambar 3.28 Pelatihan budidaya tanaman perkebunan (karet) dan penguatan kelembagaan kelompok tani.....	130
Gambar 3.29 Pendampingan pengendalian penyakit tanaman perkebunan.....	130

Gambar 3.30 Fasilitasi pertemuan petani kopi dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, DKP3, dan investor di BPP Karang Joang sebagai upaya penguatan pemasaran, kemitraan usaha, dan adaptasi perubahan iklim pada sektor perkebunan.	131
Gambar 3.31 Pemeriksaan kesehatan ternak ayam petelur oleh dokter hewan di kandang ayam Kodam VI Transad Manggar, disertai monitoring populasi ternak dan pembinaan teknis kepada peternak.....	132
Gambar 3.32 Kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan hijauan pakan ternak serta pencegahan dan pengendalian penyakit ternak yang dilaksanakan di BPP Teritip (28 April 2025) dan BPP Karang Joang (29 April 2025).....	134
Gambar 3.33 Kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan produk, serta pengawasan keamanan pangan asal hewan, termasuk pengawasan produk pangan asal hewan menjelang Hari Besar Keagamaan.....	135
Gambar 3.34 Penyerahan dan fasilitasi sarana perikanan tangkap berupa mesin kapal kepada kelompok nelayan.....	137
Gambar 3.35 Penyerahan bantuan bibit ikan nila sebanyak 2.000 ekor dari Balai Benih Ikan (BBI) Teritip kepada kelompok ISF Transad	138
Gambar 3.36 Kegiatan pelatihan diversifikasi usaha nelayan di Sentra Industri Kecil Terpadu (SIKT) Teritip.....	138
Gambar 3.37 Kolaborasi kegiatan peningkatan kualitas dan mutu hasil perikanan bersama BP2MHKP, pengecekan administrasi usaha pembudidaya oleh PSDKP, layanan Gerai Pelangi oleh penyuluh perikanan, serta penguatan keberlanjutan kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pembudidaya ikan DKP3 Kota Balikpapan	139
Gambar 3.38 Kegiatan sosialisasi keselamatan dan keamanan di anjungan lepas pantai PT. Pertamina Hulu Kaltim kepada nelayan.....	140
Gambar 3.39 Kegiatan koordinasi, komunikasi sosial, dan kolaborasi terkait pengamanan dan keselamatan laut (PAM KAMLA) antara DKP3 Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Klandasan	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan kewajiban akuntabilitas kinerja sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, yang diukur melalui indikator kinerja utama, sasaran strategis, dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tahun 2025 memiliki posisi strategis karena menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029. Namun dalam praktiknya, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah masih mengacu pada Renstra Perangkat Daerah 2021–2026. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP 2025 tidak hanya berfungsi sebagai laporan capaian kinerja tahunan, tetapi juga menjadi baseline penting untuk mengukur kesiapan dan kontribusi perangkat daerah terhadap implementasi program prioritas pembangunan, khususnya di bidang pangan, pertanian, dan perikanan, serta keterkaitannya dengan sasaran pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya LKjIP 2025 diharapkan terwujud akuntabilitas kinerja yang lebih kuat, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang lebih terarah, serta pembelajaran organisasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Nomor 821.2/709/DPPP/2023 tentang Perubahan Indikator

Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Nomor 821.2/061/DPPP/2024 tentang Penetapan Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Nomor 821.1/007/DKP3/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan dalam satu tahun anggaran. LKjIP ini merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban perangkat daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 bertujuan untuk menyediakan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tujuan tersebut meliputi :

1. Evaluasi Kinerja

Menilai pencapaian kinerja perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Perbaikan dan Pengembangan

Mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan serta pengembangan kinerja pada periode berikutnya.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya dan hasil yang dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

4. Sinkronisasi dan Kolaborasi

Mendukung keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih efektif antar perangkat daerah.

5. Dokumentasi

Mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan referensi dan pembelajaran di masa depan.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di sektor pangan, pertanian, dan perikanan. Sebagai wilayah dengan dinamika perkotaan yang terus berkembang, Kota Balikpapan membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan sektor-sektor tersebut.

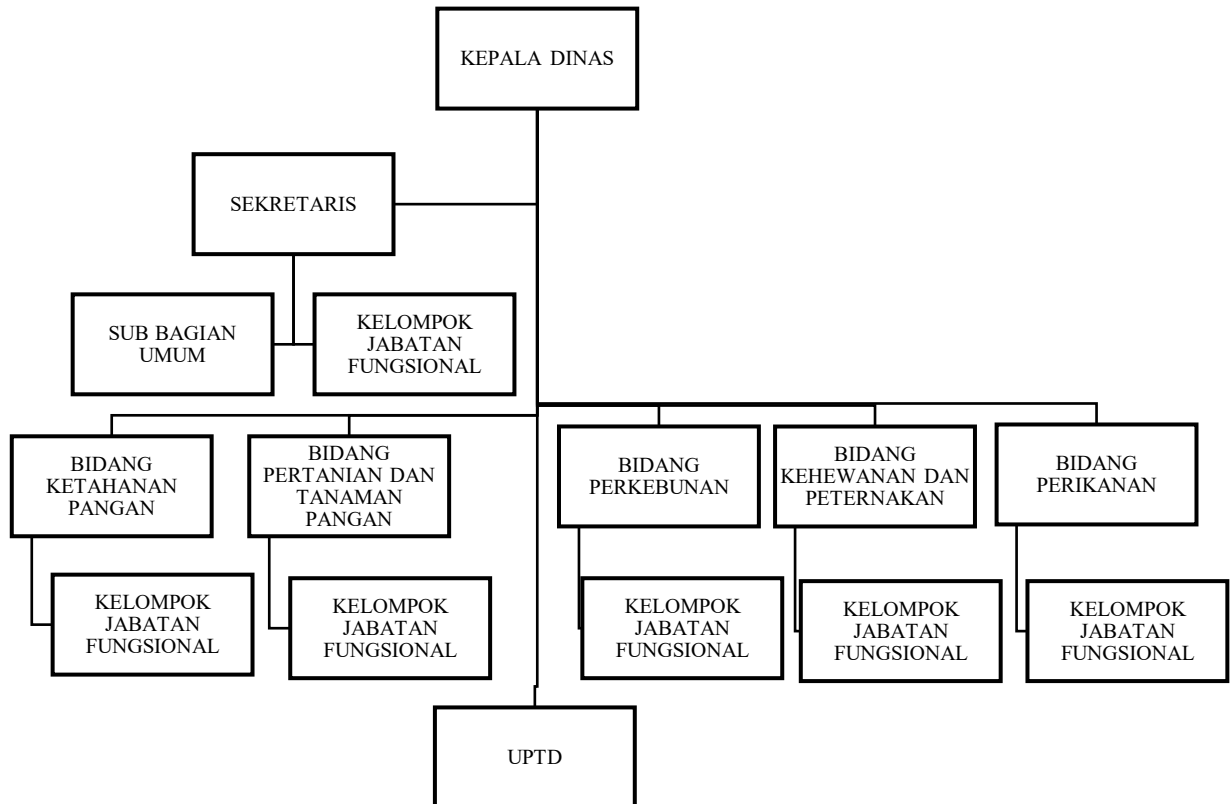
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
2. penyusunan rumusan kebijakan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
3. penyusunan standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. pemberian layanan, pengawasan dan pengendalian izin usaha bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
5. pelaksanaan pembinaan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
6. pelaksanaan penerapan teknologi bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang meliputi teknologi di tingkat petani/ nelayan;
7. pengelolaan UPTD;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan memiliki sumber daya aparatur yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian, serta pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Adapun Susunan Struktur Organisasi DPPP Kota Balikpapan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

Sumber : Peraturan Walikota nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, terdistribusi dalam jabatan struktural, Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu, dan staf non PNS. Adapun rincian SDM Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan per 31 Desember 2025 adalah sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 2025

No.	Bidang / UPT	PNS	CPNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Non ASN Sekretariat	Non ASN Kegiatan	Jumlah	Penyuluh Perikanan Pusat (PNS)	Penyuluh Perikanan Pusat (PPPK)	POPT Provinsi	Jumlah	TOTAL
1	Sekretariat	10	-	4	-	-	-	<u>14</u>	-	-	-	0	14
2	Ketahanan Pangan	4	-	9	-	-	-	<u>13</u>	-	-	-	0	13
3	Pertanian Tanaman Pangan	5	1	5	-	-	1	<u>12</u>	-	-	-	0	12
4	Perikanan	7	1	8	-	-	2	<u>18</u>	3	2		5	23
5	Kehewanan dan Peternakan	4	-	8	-	-	-	<u>12</u>	-	-	-	0	12
6	Perkebunan	4	-	5	-	1	1	<u>11</u>	-	-	1	1	12
7	UPTD RPH	6	-	4	1	-	-	<u>11</u>	-	-	-	0	11
8	BPP Teritip	4	-	4	-	-	-	<u>8</u>	-	-	-	0	8
9	BPP Karang Joang	3	-	3	-	-	-	<u>6</u>	-	-	-	0	6
	JUMLAH	47	2	50	1	1	4	105	3	2	1	6	111
	LAKI-LAKI	20	1	22	1	1	3	48	2	2	0	4	<u>52</u>
	PEREMPUAN	27	1	28	0	0	1	57	1		1	2	<u>59</u>
	JUMLAH	47	2	50	1	1	4	105	3	2	1	6	111

Berdasarkan tabel diatas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan tercatat sebanyak 111 orang. Secara kuantitas, jumlah tersebut relatif mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Namun demikian, dari sisi kualitas, pemerataan distribusi, serta kesesuaian kompetensi, masih terdapat keterbatasan terutama pada jabatan fungsional teknis dan tenaga operasional lapangan. Pada tahun 2026, terdapat 4 (empat) pegawai yang memasuki masa pensiun, yang berpotensi mengurangi kapasitas SDM, khususnya pada jabatan teknis tertentu yang membutuhkan kompetensi spesifik.

Di sisi lain, sejak Januari 2026 terjadi perubahan status kepegawaian penyuluh pertanian menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Perubahan ini pada dasarnya tidak berdampak signifikan terhadap jumlah SDM yang tersedia di lapangan, namun berdampak pada aspek kewenangan perangkat daerah, khususnya dalam hal pengelolaan kepegawaian seperti mutasi dan penempatan. Kondisi ini menyebabkan perangkat daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengendalian dan penataan penyuluh sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan, ASN dan Tenaga Bantu di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan memiliki komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jabatan dan Pendidikan Pegawai DPPP 2025

No	Jabatan	Pendidikan					
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	2	2	-	-	-	-
4	Kepala UPTD	-	1	-	-	-	-
5	Kasubag Umum	-	1	-	-	-	-
6	Kasubag TU	-	-	1	-	-	-
7	Jabatan Fungsional Tertentu	1	18	-	1	-	-

No	Jabatan	Pendidikan					
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
8	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	1	10	2	5	3	-
9	PPPK	-	17	3	24	-	7
10	Penyuluh Perikanan Pusat (KKP)	-	4	1	-	-	-
11	Staf non PNS	-	-	-	-	-	5
	Jumlah	5	53	7	30	3	12

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Tahun 2025 merupakan fase penegasan capaian kinerja sekaligus penguatan fondasi menuju periode perencanaan berikutnya. Oleh karena itu, arah pembangunan difokuskan pada peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, keberlanjutan sumber daya, serta optimalisasi peran sektor pangan, pertanian, dan perikanan dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun aspek strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025 meliputi:

1. Kerentanan terhadap perubahan iklim dan risiko lingkungan, yang mencakup perubahan pola tanam, peningkatan risiko bencana (banjir dan kekeringan), serta meningkatnya serangan hama dan penyakit.
2. Permasalahan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya, yang ditandai dengan alih fungsi lahan pertanian, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya ikan, serta fluktuasi produksi perikanan budidaya akibat keterbatasan input produksi.
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, yang tercermin dari masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan.

Permasalahan utama yang dihadapi merupakan turunan dari aspek strategis tersebut dan saling berkaitan, yang dapat dirumuskan secara lebih ringkas sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, yang berdampak pada peningkatan risiko gagal produksi akibat bencana, hama, dan penyakit.
2. Belum optimalnya sarana prasarana dan infrastruktur pendukung, yang mempengaruhi efisiensi produksi, pengolahan, dan distribusi hasil.
3. Menurunnya daya dukung dan keberlanjutan sumber daya, baik akibat alih fungsi lahan maupun penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan.
4. Belum stabilnya produksi sektor pertanian dan perikanan, akibat keterbatasan input produksi serta faktor lingkungan.
5. Keterbatasan kapasitas SDM dan kelembagaan, termasuk rendahnya regenerasi pelaku usaha serta keterbatasan tenaga teknis dan penyuluh.
6. Meningkatnya tuntutan produksi dan kualitas produk, dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah dan kawasan penyangga IKN.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Balikpapan tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan membentuk suatu siklus permasalahan yang kompleks. Kerentanan terhadap perubahan iklim menjadi faktor eksternal yang memperbesar risiko penurunan produksi, sementara keterbatasan sarana prasarana dan input produksi menghambat upaya peningkatan produktivitas secara optimal.

Di sisi lain, tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya seperti alih fungsi lahan dan penurunan kualitas sumber daya perikanan semakin mempersempit ruang peningkatan produksi. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun regenerasi pelaku usaha, yang berdampak pada rendahnya kemampuan adaptasi, inovasi, dan penerapan teknologi di lapangan.

Selain itu, meningkatnya tuntutan terhadap produksi dan kualitas produk, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan peran Balikpapan sebagai kawasan penyangga IKN, menuntut adanya peningkatan kinerja sektor secara signifikan di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, melalui penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan produktivitas berbasis efisiensi dan teknologi, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kontribusi sektor pangan, pertanian, dan perikanan dalam pembangunan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
 - 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis
 - 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Mengacu Pada SPM / Standar Nasional / Internasional (Benchmark Kinerja)
 - 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan
 - 3.2.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
 - 3.2.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Dokumen ini menjadi landasan utama dalam pengukuran kinerja perangkat daerah dengan mengintegrasikan kapasitas sumber daya manusia serta potensi organisasi. Melalui perencanaan yang terarah, sistematis, dan berbasis hasil, perangkat daerah diharapkan mampu merespons dinamika lingkungan strategis di tingkat lokal, nasional, maupun global dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan menyusun Rencana Strategis (Renstra) secara partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan pimpinan serta seluruh unsur organisasi. Renstra disusun untuk periode lima tahunan sebagai arah kebijakan dan kerangka perencanaan kinerja perangkat daerah, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan.

Perencanaan strategis Dinas menggambarkan arah kebijakan serta perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunannya mengacu pada dua dokumen utama, yaitu Renstra Tahun 2021–2026 sebagai periode sebelumnya dan Renstra Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan baru. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan, konsistensi pengukuran kinerja, serta keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa peralihan periode perencanaan.

Perencanaan strategis Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran capaian indikator, serta evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan tetap memperhatikan perbedaan tujuan, sasaran, dan target antar periode Renstra secara proporsional dan terukur.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2021–2026 telah dilantik pada tanggal 31 Mei 2021 dan menetapkan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026. Adapun visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
Visi:

Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman.

Misi:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai.
4. Mewujudkan kota yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan memiliki peran strategis terutama dalam mendukung Misi ke-5, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Peran ini diwujudkan melalui pengembangan sektor pangan, pertanian, dan perikanan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta penguatan daya saing produk lokal.

Sebagai turunan dari visi dan misi pembangunan daerah tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2021–2026. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

Berikut disajikan tabel Tujuan, Sasaran, dan Target Renstra Tahun 2021–2026 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan sebagai dasar pelaksanaan kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada tahun Ke -				
						2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase penguatan cadangan pangan	(%)	3%	9%	10%	12%	14%	16%
		2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragamdan Aman	1. Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap/hari)	(%)	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	95%	95%
			2. Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap/hari)	(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Keamanan Pangan	(%)	100%	88%	89%	89%	90%	90%
		3. Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	1. Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	17.475	17.500	17.800	18.000	18.000	18.000
			2. Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	114.873	120.500	126.600	133.000	140.000	147.000
			3. Total Produksi	Ton	9.548,5	9.886	10.193	10.501	10.809	11.116

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada tahun Ke -				
						2022	2023	2024	2025	2026
			Sub Sektor Tanaman Perkebunan							
			4. Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	27.403	20.500	20.600	20.700	20.800	20.900
			5. Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4.275	4.489	4.597	4.704	4.812	4.919
		4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor/ point	N/A	27	28	29	30	31

Sumber : Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan pada periode perencanaan terbaru, perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan periode 2025–2029. Penyelarasan ini dilakukan agar tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah memiliki keterkaitan yang jelas dan langsung dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Visi dan misi Wali Kota Balikpapan periode 2025–2029 menjadi landasan utama dalam perumusan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Dinas pada periode tersebut. Dengan demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dapat mendukung secara optimal pencapaian target pembangunan daerah, khususnya di sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

Adapun visi dan misi Wali Kota Balikpapan periode 2025–2029 yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Visi :

Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi :

1. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat.
2. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan.
3. Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik.
4. Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua.
5. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua.
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Ketahanan Pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	5,9	5,67	5,4	5,13	4,86	4,59
	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	87,35	87,35	87,68	87,98	88,29	88,6
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,03	82,24	82,40	82,60	82,80	83,00

Sumber: Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Perbedaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja antara Renstra periode 2021–2026 dan Renstra periode 2025–2029 merupakan konsekuensi logis dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan daerah, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta penyelarasan dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan pada periode perencanaan terbaru.

Meskipun terdapat perbedaan dalam formulasi sasaran dan indikator, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2025 tetap berlangsung secara berkesinambungan. Program-program yang telah berjalan pada periode sebelumnya tetap dilanjutkan sepanjang masih relevan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan demikian, masa transisi perencanaan pada Tahun 2025 tidak mengganggu keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat keselarasan antara perencanaan lama dan perencanaan baru. Seluruh kegiatan tetap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	5,67			
Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	14%	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	87,35	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	95%				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	100%						

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
	Persentase Keamanan Pangan	90%				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	18.000				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	140.000						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	10.809				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
							Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
								Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
								Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
								Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
	Total Produksi Sub Sektor Peternakan	20.800				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
							Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	4.812				PROGRAM PENGELOLAAN	Pemberdayaan Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
						PERIKANAN TANGKAP	dalam daerah Kabupaten/Kota	
								Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
							Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
								Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	81,7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber: Tim Kerja Program Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025

2.2 Indikator Kinerja Utama

Subbab ini memuat penyajian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. IKU yang disajikan meliputi dua periode perencanaan, yaitu IKU periode Renstra Tahun 2021–2026 beserta perubahan yang telah ditetapkan, serta IKU periode Renstra Tahun 2025–2029 sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan terbaru.

IKU Tahun 2021–2026 merupakan indikator kinerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan nomor 821.2/704/DPPP/2023 tanggal 27 Desember 2023 dan digunakan sebagai acuan utama dalam pengukuran kinerja perangkat daerah pada periode tersebut. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator guna memastikan relevansi dan kesesuaian dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan pengukuran kinerja yang lebih akurat.

Sejalan dengan dimulainya periode perencanaan baru, ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan IKU periode terbaru ini bertujuan untuk menyelaraskan indikator kinerja dengan visi, misi, serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra 2025–2029.

Adapun visi pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 adalah:

“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat.
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur terpadu yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan berperan utama dalam mendukung Misi ke-4, yaitu mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua, melalui penguatan sektor pangan, pertanian, dan perikanan yang berbasis pada peningkatan produksi, nilai tambah, serta pemberdayaan pelaku usaha masyarakat.

Keterkaitan IKU perangkat daerah dengan Misi ke-4 menunjukkan bahwa sektor pangan, pertanian, dan perikanan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif. Melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, serta penguatan hilirisasi dan daya saing produk lokal, DKP3 berkontribusi langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkeadilan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021–2026 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nomor 821.2/709/DPPP/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Cadangan pangan merupakan persediaan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu berupa beras atau non beras.	$(\sum \text{cadangan pangan kota} / 200 \text{ ton}) \times 100\%$	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	Jumlah energi yang harus dikonsumsi oleh setiap orang dalam melakukan kegiatan / aktivitas per hari sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan	$(\text{Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap./hari)} / \text{Angka Kecukupan Energi}) \times 100\%$	Susenas, BPS	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	Jumlah protein yang harus dikonsumsi oleh setiap orang dalam melakukan kegiatan / aktivitas per hari sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan	$(\text{Jumlah Konsumsi protein (kkal/kap./hari)} / \text{Angka Kecukupan Protein}) \times 100\%$	Susenas, BPS	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase Keamanan Pangan	Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.	$(\text{Jumlah Sampel PSAT yang aman} / \text{Jumlah Sampel yang Diperiksa}) \times 100\%$	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Data Produksi Tanaman pangan utama dikelompokkan menjadi tanaman biji-bijian atau sereal (padi dan jagung), tanaman polong semusim (kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau), dan tanaman umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar)	(jumlah Luas Panen x Produktivitas)	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah- buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen.	(jumlah Luas Panen x Produktivitas)	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Produksi kebun atau lazim disebut produksi primer adalah produksi/hasil yang dipanen dari usaha perkebunannya tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut.	(jumlah Luas Panen x Produktivitas)	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Produksi peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut	(Jumlah Populasi x (90 kg/ 1000))	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				(Jumlah Populasi x (1,5 kg/ 1000))	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				(Jumlah Telur / 16) / 1000	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan	Penghitungan Langsung di Lapangan	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai/Skor Tim Penilai SAKIP	DPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Nomor : 821.2/709/DPPP/2023

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029, perangkat daerah juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Dinas. Penetapan IKU pada periode Renstra terbaru tersebut disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, serta fokus pembangunan daerah pada periode 2025–2029.

IKU Tahun 2025–2029 dirumuskan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan. Indikator-indikator tersebut mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga dapat menjadi dasar yang konsisten dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nomor 821.1/007/DKP3/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) dihitung sebagai luas di bawah kurva fungsi kepadatan probabilitas konsumsi kalori ($f(x)$) untuk tingkat konsumsi energi yang lebih rendah daripada kebutuhan minimum energi (MDER).	BPS	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi adalah Angka yang menunjukkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi 9 kelompok pangan terhadap total konsumsi energi harian	Sumber data komponen perhitungan berdasarkan rilis BPS selanjutnya diolah oleh Dinas/PD Kota Balikpapan yang membidangi pangan	BPS	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas	DKP3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Nomor : 821.1/007/DKP3/2026

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada subbab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup Perjanjian Kinerja murni yang ditetapkan pada awal tahun anggaran serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang dilakukan dalam tahun berjalan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, serta memberikan gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja tersebut diukur melalui Perjanjian/Penetapan Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan (dokumen terlampir). Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen Kepala Dinas untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas pada Tahun 2025. Adapun Perjanjian/Penetapan Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Persen	14%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	Persen	94,5%
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	Persen	100%
		Persentase Keamanan Pangan	Persen	89%
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18.000
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	140.000
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Ton	10.809
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	20.800
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4.812

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Poin	81,7

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025

Subbab ini turut menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, adanya penyesuaian kebijakan, serta kebutuhan penyempurnaan target dan indikator kinerja agar tetap selaras dengan kondisi dan kebutuhan aktual.

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Persen	13,09	14
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	Persen	94,5	95
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	Persen	114	100
		Persentase Keamanan Pangan	Persen	100	90
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	21.832,30	18.000
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	146.788,60	140.000
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Ton	15.274,22	10.809
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	24.199,17	20.800

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4.182,75	4.812
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Poin	81,03	81,7

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025

Sehubungan dengan Tahun 2025 yang berada pada masa transisi menuju periode perencanaan baru, subbab ini juga memuat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dokumen periode terbaru.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan terbaru. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan pengelolaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah tetap berjalan secara konsisten dan terarah pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	%	5,9	5,67
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,35	87,35

2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,03	81,70
---	---	-----------------------------	-------	-------	-------

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025

Pada subbab ini turut dipaparkan rencana anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bentuk dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan mengalokasikan anggaran murni sebesar Rp 29.867.266.647 (dua puluh Sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2025, pagu anggaran tersebut mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp 30.499.997.750 (tiga puluh miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Rincian pendanaan untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Rencana Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	14%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 569.513.160	APBD-P
				Kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 569.513.160	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 569.513.160	APBD-P
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 282.573.750	APBD-P
				Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 282.573.750	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp 282.573.750,0	APBD-P
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	95%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 187.224.187,5	APBD-P
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	100%	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;	Rp 187.224.187,5	APBD-P
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	187.224.187,50	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
		Persentase Keamanan Pangan	90%	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 51.148.050	APBD-P
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Rp 51.148.050	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 51.148.050	APBD-P
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	18.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 970.485.473	APBD-P
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	140.000	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 894.975.245	APBD-P
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	10.809	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 666.378.600	APBD-P
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 228.596.645	APBD-P
				Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 75.510.228	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp 75.510.228	APBD-P
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 1.216.266.125	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.161.266.125	APBD-P
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp 500.000.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp 661.266.125	APBD-P
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 55.000.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Rp 55.000.000	APBD-P
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 227.076.610	APBD-P
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 227.076.610	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp 227.076.610	APBD-P
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 975.602.300	APBD-P
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 975.602.300	APBD-P
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 200.000.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 204.903.750	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp 454.987.775	APBD-P
				Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 47.310.775	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Rp 68.400.000	APBD-P
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	20.800	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 865.000.000	APBD-P
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 865.000.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rp 865.000.000	APBD-P
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp 19.371.250	APBD-P
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.371.250	APBD-P
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 19.371.250	APBD-P
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 741.515.443	APBD-P
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rp 482.439.720	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp 482.439.720	APBD-P
				Kegiatan Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 259.075.723	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rp 259.075.723	APBD-P
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	4.812	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 563.771.580	APBD-P
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp 259.814.300	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp 141.566.800	APBD-P
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp 118.247.500	APBD-P
				Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp 303.957.280	APBD-P
				Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp 303.957.280	APBD-P
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 1.434.172.803	APBD-P
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 205.389.485	APBD-P
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 57.437.500	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Rp 147.951.985	APBD-P
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 1.228.783.318	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.800.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.146.369.318	APBD-P
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Rp 48.614.000	APBD-P
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	81,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 22.396.277.018,5	APBD-P
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp 17.826.137.400	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 17.826.137.400	APBD-P
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 749.401.836	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 36.120.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 87.237.570	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 400.591.698	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 34.838.055	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 190.614.512,5	APBD-P
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.123.343.800	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 7.000.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 299.798.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.816.545.800	APBD-P
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.355.492.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.090.194.000	APBD-P
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 265.298.000	APBD-P
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 341.901.983	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 341.901.983	APBD-P
Jumlah					Rp 30.499.997.750	

Sumber : DPA Perubahan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi atau individu untuk melaksanakan tugas sesuai target yang telah ditetapkan serta mempertanggungjawabkan hasilnya secara terbuka kepada para pemangku kepentingan. Konsep ini menekankan pada pencapaian hasil yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan sumber daya guna mewujudkan tujuan strategis yang telah direncanakan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), akuntabilitas kinerja mencakup tahapan perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan oleh Inspektorat Kota Balikpapan tanggal 19 Mei 2025, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 memperoleh nilai 82,24 dengan predikat A, dengan rincian penilaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rincian hasil evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,37
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,32
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,35
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,2
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	82,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil evaluasi inspektorat Kota Balikpapan, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan kepada manajemen Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Kota Balikpapan yaitu :

Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	PERENCANAAN KINERJA	Agar menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1xhRh_vXnl9jDoWgozOz1siqyjlW7e5UZ?usp=drive_link 
		Agar meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	1. Evaluasi dan Internalisasi Kinerja kepada seluruh Pegawai https://drive.google.com/file/d/1ZK7JXsJriiz5P0YMOmQaEtmrWPv8KrjL/view?usp=drive_link Rapat Ekspose Rencana Aksi 2025 : https://drive.google.com/file/d/1damfc6YrQdrvbXRLwCz9N5zFK4-NSPKM/view?usp=drive_link 2. Monitoring dan Evaluasi berkala capaian kinerja MONEV IKU TW 1 : https://drive.google.com/file/d/1_vwwnjlcSJCjj7poQxBK0MQWPJ-YWtY9/view?usp=drive_link MONEV IKU : https://drive.google.com/file/d/1q10_51WNvSn7DXaMb18vsi8I1bpW1mQ9/view?usp=drive_link 3. Penerapan Reward dan Punishment berdasarkan capaian dan kontribusi terhadap target kinerja

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
			https://drive.google.com/drive/folders/1GZaThzDfRiF_wziDQvHL0dX41d9rWxGz?usp=drive_link
2	PENGUKURAN KINERJA	Perlu perbaikan capaian kinerja terutama pada indikator produksi sumber daya pangan sub sektor perikanan dengan memanfaatkan informasi pada laporan kinerja	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan berkomitmen untuk menjadikan laporan kinerja sebagai referensi utama dalam proses perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas capaian indikator, sehingga target kinerja sub sektor perikanan dapat dicapai secara optimal pada periode berikutnya. Sebagai langkah perbaikan terhadap capaian kinerja pada indikator produksi sumber daya pangan sub sektor perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan merencanakan tindak lanjut sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi dan penggalan potensi perikanan tangkap maupun budidaya yang belum tercakup dalam pendataan, guna memastikan seluruh pelaku usaha perikanan yang aktif dapat difasilitasi secara tepat. https://docs.google.com/document/d/1QGFhi7DL2AXdhymvix7CvsjQojDD8HoW/edit?usp=drive_link&ouid=108977091655235887171&rtpof=true&sd=true 2. Memperluas cakupan pembinaan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan melalui penambahan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang menjadi sasaran pendampingan program peningkatan kapasitas dan akses sarana produksi. https://docs.google.com/document/d/14wYc_o1fiDxRbnZKSl3aymaqybEBwn90/edit?usp=drive_link&ouid=108977091655235887171&rtpof=true&sd=true 3. Meningkatkan dukungan sarana

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
			dan prasarana penangkapan ikan, terutama bagi nelayan kecil, dalam bentuk bantuan peralatan tangkap, cool box, atau fasilitas pendukung lainnya yang relevan dengan karakteristik wilayah. https://drive.google.com/file/d/1EWVzB4RHA4bGgSoqCYY76r9y7BIwXlX0/view?usp=drive_link
		Agar pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi informasi yang mencakup pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari pimpinan perangkat daerah sampai ke tingkat individu pegawai	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan berkomitmen untuk mengembangkan pengukuran kinerja yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi dan berjenjang. Sebagai tindak lanjut, kami akan: 1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi kinerja yang telah tersedia, seperti aplikasi e-Kinerja, REAKSI dan Google Drive sebagai sarana pencatatan, pelaporan, dan pemantauan capaian kinerja secara real-time. https://docs.google.com/document/d/1B1r840syNlxRvez3XtQilymoGqJgdUcw/edit?usp=drive_link&ouid=108977091655235887171&rtpof=true&sd=true 2. Melakukan penyelarasan kinerja mulai dari level pimpinan perangkat daerah hingga individu ASN, melalui proses cascading kinerja yang sistematis dan terdokumentasi dalam pohon kinerja. Cascading DKP3 https://drive.google.com/file/d/1iM2CAP0PMxaXfLFkQMX5YgeCQaad5Jnj/view?usp=drive_link Pohon Kinerja https://drive.google.com/file/d/1OL7pC9FIftTnPvIUtp7PMZe_qo2AgRh/view?usp=drive_link 3. Meningkatkan literasi digital pegawai, termasuk pelatihan teknis pemanfaatan aplikasi kinerja bagi pejabat struktural maupun pelaksana. https://docs.google.com/document/d/1XX-uj3mI6bmljUSieJMCLpNopYAZ6ioc/edit?usp=drive_link&ouid=108977091655235887171&rtpof=true&sd=true

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
3	PELAPORAN KINERJA	Agar seluruh pegawai meningkatkan kepedulian pada penyajian informasi dalam laporan kinerja	Telah dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab seluruh pegawai dalam penyusunan laporan kinerja melalui internalisasi dan pembagian tugas yang lebih terstruktur, serta penekanan pada pentingnya validitas data. 1. Dokumentasi keikutsertaan dalam Sosialisasi penyusunan LKjIP Tahun 2025 https://docs.google.com/document/d/17uH_UrUAW5PzXi42uR30QhmV-6hs_O8O/edit?usp=drive_link&ouid=108977091655235887171&rtpof=true&sd=true 2. Template pengumpulan data kinerja dari bidang https://docs.google.com/document/d/12R6Ue77lDrxEjXGnHDJpSACWuQJS2gOk/edit?usp=drive_link&ouid=108977091655235887171&rtpof=true&sd=true 3. Rapat Sinkronisasi Data Kinerja Bersama Penyuluh (Data Produksi Pertanian) https://docs.google.com/document/d/10CY2s6Q7YKEtibPUBDDjakwge91gCWuQ/edit?usp=drive_link&ouid=108977091655235887171&rtpof=true&sd=true
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	Telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan menyusun dan melaksanakan rencana aksi perbaikan sesuai rekomendasi Inspektorat. Monitoring terhadap tindak lanjut dilakukan secara berkala dan dilaporkan melalui sistem pelaporan internal maupun dalam forum evaluasi kinerja. 1. LHE 2024 https://drive.google.com/file/d/1rwyJDQjHv1Y7nomxtY0XY0tmwwav0nUk/view?usp=drive_link 2. Tindak Lanjut LHE 2024 https://drive.google.com/file/d/1z1G-pnHCFanAs4K7zFR1lX3PFqZOlrpy/view?usp=drive_link 3. Pohon Kinerja https://drive.google.com/file/d/1OL7pC9FItfTnPvIUtp7_PMZe_qo2AgRh/view?usp=drive_link 4. Cascading DKP3

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
			https://drive.google.com/file/d/1iM2CAP0PMxaXfLFkQMX5YgeCQaad5Jnj/view?usp=drive_link 5. PERDA CPPD https://drive.google.com/file/d/1YqVLNOqIdTGJLf47Fu16L4n2WJN809jo/view?usp=drive_link 6. PERWALI CPPD https://drive.google.com/file/d/1xwvjMWIt0AYX1ukv6DUNF_PsJvCV9OOQ/view?usp=drive_link 7. JUKNIS PENYALURAN CPPD https://drive.google.com/file/d/1vPQESmkHALUzVM3hFXzhK_pzl3UJHJrI/view?usp=drive_link

Sumber : Hasil Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi merupakan gambaran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat capaian tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan sejauh mana program dilaksanakan secara efektif, efisien, serta memberikan dampak nyata.

Pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran strategis dilakukan menggunakan skala peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah terkait RPJPD dan RPJMD serta mekanisme perubahan dokumen perencanaan daerah. Skala tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidaktercapaian dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber : Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan

Pengukuran kinerja merupakan unsur penting dalam memastikan organisasi mampu mewujudkan visi dan misi secara efektif serta efisien. Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data, pengukuran kinerja memberikan gambaran objektif mengenai tingkat pencapaian, mengidentifikasi keunggulan, sekaligus menemukan area yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, seluruh aktivitas operasional dapat dipastikan berjalan searah dengan strategi yang telah dirumuskan.

Lebih lanjut, pengukuran kinerja menjadi penghubung antara perencanaan strategis dan pertanggungjawaban kinerja. Keberhasilan Perangkat Daerah tercermin dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dan diukur secara konsisten terhadap pencapaian tujuan serta sasaran. Tanpa proses ini, pencapaian organisasi akan sulit dibuktikan secara rasional dan terukur.

Secara konseptual, pengukuran kinerja adalah proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk menilai keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan indikator kinerja yang didukung oleh data internal maupun eksternal, dengan membandingkan antara target yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis dan rencana kinerja dengan realisasi yang dicapai.

Dalam implementasinya, pengukuran kinerja mencakup penilaian atas capaian target masing-masing indikator kegiatan serta tingkat keberhasilan sasaran yang tertuang dalam dokumen rencana kerja. Hasilnya didasarkan pada data kinerja yang valid dan dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui dua metode utama, yaitu:

1. Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini menggunakan Formulir Perjanjian Kinerja (PK) dengan membandingkan rencana dan realisasi capaian setiap indikator kinerja kegiatan. Evaluasi tersebut membantu mengidentifikasi kelemahan, kendala, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Metode Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

Metode ini membandingkan rencana kinerja (performance plan) dengan hasil kinerja yang terealisasi (performance result). Selisih atau gap yang muncul dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan pada periode berikutnya. Selain itu, metode ini memberikan gambaran kepada pihak eksternal mengenai tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penerapan kedua metode tersebut mensyaratkan indikator kinerja yang relevan, objektif, spesifik, terukur, kuantitatif, aplikatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini, penilaian keberhasilan program umumnya masih didominasi oleh indikator output dan outcome.

Di samping itu, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan capaian aktual terhadap target yang telah ditetapkan, serta membandingkan kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya. Pendekatan ini penting untuk memastikan adanya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan dan terarah.

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Kota Balikpapan tahun 2025 merupakan pengukuran sekaligus evaluasi terhadap target kinerja sesuai dengan Penetapan / Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran tersebut. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja Perubahan Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Persen	14%	12,61%	90,07	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	Persen	95%	89,36%	94,06	Tidak Tercapai
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	Persen	100%	111,05%	111,05	Melebihi Target
		Persentase Keamanan Pangan	Persen	90%	98,75%	109,72	Melebihi Target
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18.000	17.128,00	95,16	Tidak Tercapai
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	140.000	57.321,24	40,94	Tidak Tercapai
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Ton	10.809	11.638,69	107,68	Melebihi Target
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	20.800	21.373,68	102,76	Melebihi Target
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4.812	5.942,30	123,49	Melebihi Target
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Poin	81,70	82,24	100,66	Melebihi Target

Sumber : DKP3, 2026

Catatan:

1. Mohon perhatikan capaian kinerja bagi indikator kinerja yang sifatnya negatif (semakin tinggi realisasi yang tercapai berarti semakin baik kinerjanya) dan gunakan rumus hitung capaian yang sesuai;

2. Tambahkan uraian penjelasan/ analisis atas data yang difokuskan pada penafsiran tabel, tanpa mengulang data secara deskriptif. Uraian disusun ringkas, faktual, dan konsisten dengan informasi pada tabel.

Berdasarkan Tabel 3.4, capaian kinerja menunjukkan bahwa indikator yang bersifat teknis cenderung lebih mudah mencapai target dibandingkan indikator yang bersifat strategis. Capaian pada indikator penguatan cadangan pangan dan konsumsi energi yang belum optimal mengindikasikan masih adanya kendala pada aspek sistem, ketersediaan, dan distribusi. Sementara itu, keberhasilan pada indikator konsumsi protein, keamanan pangan, serta beberapa subsektor produksi menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi teknis telah berjalan efektif.

Perbedaan capaian antar subsektor produksi juga menunjukkan bahwa kinerja sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan sarana prasarana, serta karakteristik masing-masing komoditas. Di sisi lain, capaian akuntabilitas kinerja yang baik mencerminkan bahwa pengelolaan kinerja organisasi telah berjalan secara efektif.

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian target sasaran strategis dari seluruh indikator pada Tahun 2025 mencapai 97,56%, namun secara keseluruhan masih dikategorikan belum mencapai target yang ditetapkan.

Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pangan, pertanian, dan perikanan dengan cukup baik. Namun demikian, capaian kinerja masih perlu dioptimalkan, terutama pada indikator yang bersifat strategis. Hal ini mengingat target kinerja dalam RPJMD Tahun 2021–2026 bersifat kumulatif dan didistribusikan secara proporsional setiap tahun, sehingga kekurangan capaian pada tahun berjalan akan menjadi beban pada tahun akhir periode perencanaan.

Tahun 2025 juga merupakan tahun transisi menuju periode Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, capaian target Tahun 2025 tidak hanya dibandingkan dengan dokumen perencanaan periode sebelumnya, tetapi juga diselaraskan dengan target awal dalam Renstra 2025–2029 sebagai dasar penyesuaian arah kebijakan dan penetapan baseline kinerja pada periode perencanaan yang baru.

Adapun capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada Renstra 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	Persen	5,67	8,24	68,81	Tidak Tercapai
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,35	91	104,01	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Nilai	81,70	82,24	100,66	Melebihi Target

Sumber : DKP3, 2026

Catatan:

1. Mohon perhatikan capaian kinerja bagi indikator kinerja yang sifatnya negatif (semakin tinggi realisasi yang tercapai berarti semakin baik kinerjanya) dan gunakan rumus hitung capaian yang sesuai;
2. Tambahkan uraian penjelasan/ analisis atas data yang difokuskan pada penafsiran tabel, tanpa mengulang data secara deskriptif. Uraian disusun ringkas, faktual, dan konsisten dengan informasi pada tabel.

Capaian target sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025–2029 menunjukkan rata-rata keberhasilan sebesar 102,3% pada Tahun 2025 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Melebihi Target”.

Dari dua sasaran strategis yang diampu, seluruh indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat serta penguatan tata kelola kinerja perangkat daerah.

Namun demikian, berdasarkan Tabel 3.5, capaian pada tingkat tujuan perangkat daerah masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator ketahanan pangan yang belum mencapai target, sehingga mengindikasikan bahwa peningkatan pada level sasaran belum sepenuhnya berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengaruh faktor struktural, seperti keterbatasan akses dan keterjangkauan pangan, serta pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, capaian pada indikator sasaran yang melampaui target menunjukkan bahwa intervensi pada aspek kualitas konsumsi dan tata kelola kinerja telah berjalan efektif.

Dengan demikian, diperlukan penguatan keterkaitan antara sasaran dan tujuan melalui intervensi yang lebih komprehensif, khususnya pada aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan, agar pencapaian tujuan perangkat daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Dalam konteks tersebut, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 tetap dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari analisis kesinambungan kinerja.

Perbandingan ini dimaksudkan untuk menunjukkan perkembangan kinerja selama periode Renstra 2021–2026, yang didukung oleh data historis lengkap dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024, sesuai dengan dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Rincian realisasi dan capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase penguatan cadangan pangan	Persen	10	15	7,9	88%	2	20%	13,09	109,08%	12,61	90,07%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap/hari)	Persen	90	-	95	101%	94,9	100%	94,5	100%	89,36	94,06%
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap/hari)	Persen	108,9	-	115	115%	116	116%	114	114%	111,05	111,05%
		Persentase Keamanan Pangan	Persen	112	127	100	114%	100	112%	100	112,36%	98,75	109,71%
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	13.567,40	78	14.081	80%	16.956	95%	21.832,30	121,29%	17.128	95,15%
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	182.845	293,2	187.540	156%	185.175	146%	146.788,60	110,37%	57.321,24	40,94%

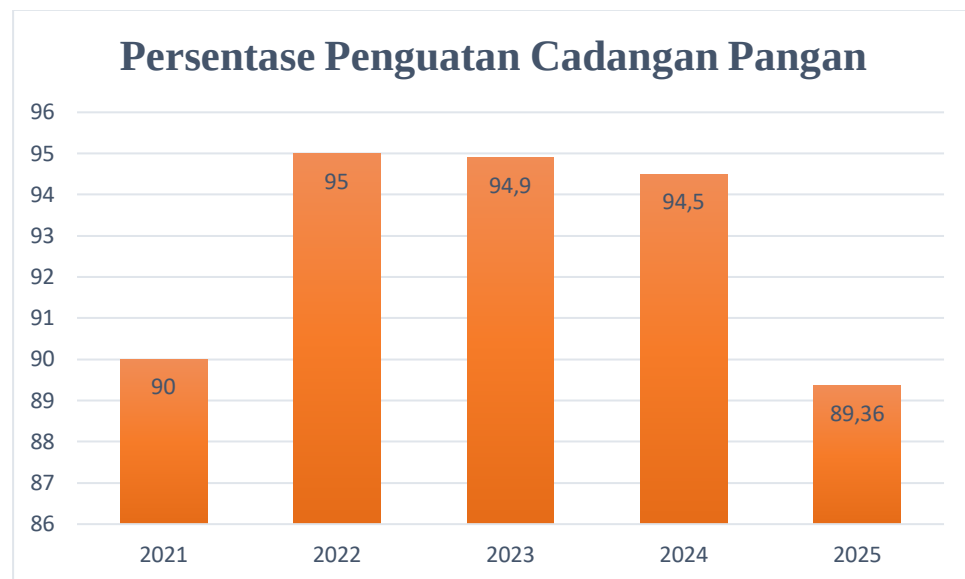
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Ton	14.234,87	202,40%	16.087	163%	16.568,21	163%	15.274,22	145,45%	11.638,69	107,67%
		Total Produksi Sub Sektor Pernakanan	Ton	20.784,63	65,10%	17.714	86%	17.094,79	83%	24.199,17	116,9%	21.373,68	102,75%
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	5.039,06	73,50%	4.800	107%	4.660,17	101%	4.182,75	88,92%	5.942,30	123,48%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Poin	81,91	Tidak ditargetkan dalam Sasaran Strategis Renstra 2021– 2026.	80,08	99%	80,08	99%	81,03	99,42%	82,24	100,66%

Sumber : Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun lalu (tahun 2024) dan dapat diketahui bahwa ada trend peningkatan realisasi pada 2 (dua) indikator kinerja, sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja mengalami trend penurunan dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran 1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan data pada Tabel 3.6, capaian sasaran strategis Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan 19,01% dibandingkan tahun 2024. Berikut adalah diagram perbandingan Indikator Kinerja Persentase Penguatan Cadangan Pangan dari Tahun 2021-2025.



Gambar 3.1

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Penguatan Cadangan Pangan dari tahun 2021-2025

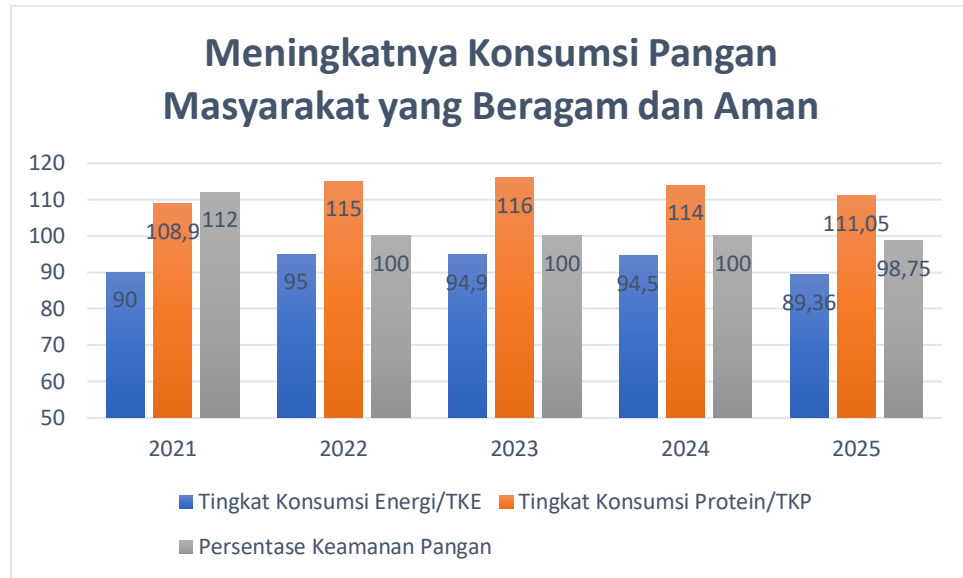
Sasaran 2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 capaian sasaran strategis Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Untuk capaian indikator Tingkat Konsumsi Energi/TKE mengalami penurunan sebesar 5,94 % dari tahun sebelumnya.

- Untuk capaian indikator Tingkat Konsumsi Protein/TKP mengalami penurunan sebesar 2,95 % dari tahun sebelumnya.
- Untuk capaian indikator Persentase Keamanan Pangan mengalami penurunan 2,65% dari tahun sebelumnya.

Berikut adalah diagram perbandingan Indikator Kinerja Persentase Penguatan Cadangan Pangan dari Tahun 2021-2025.



Gambar 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman dari tahun 2021-2025

Berdasarkan hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret Tahun 2025, capaian Tingkat Konsumsi Energi (TKE) masyarakat Kota Balikpapan tercatat sebesar 89,36% terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100 kkal/kapita/hari, sehingga berada pada batas bawah kategori normal (90–119%) dan menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 94,5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan energi masyarakat belum optimal, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, perubahan pola konsumsi, serta keterbatasan akses terhadap pangan beragam dan bergizi. Meskipun masih tergolong normal menurut klasifikasi Departemen Kesehatan, kondisi ini perlu mendapat perhatian melalui penguatan edukasi gizi, diversifikasi pangan lokal, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Capaian Angka Kecukupan Protein (AKP) Tahun 2025 sebesar 111,05% dari target 57 gram/kapita/hari, masih berada pada kategori normal, meskipun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat relatif terjaga, didukung oleh ketersediaan sumber protein hewani dan nabati. Namun, diperlukan penguatan hilirisasi, peningkatan kualitas pascapanen, dan kemitraan pemasaran guna menjaga keberlanjutan konsumsi pangan bergizi.

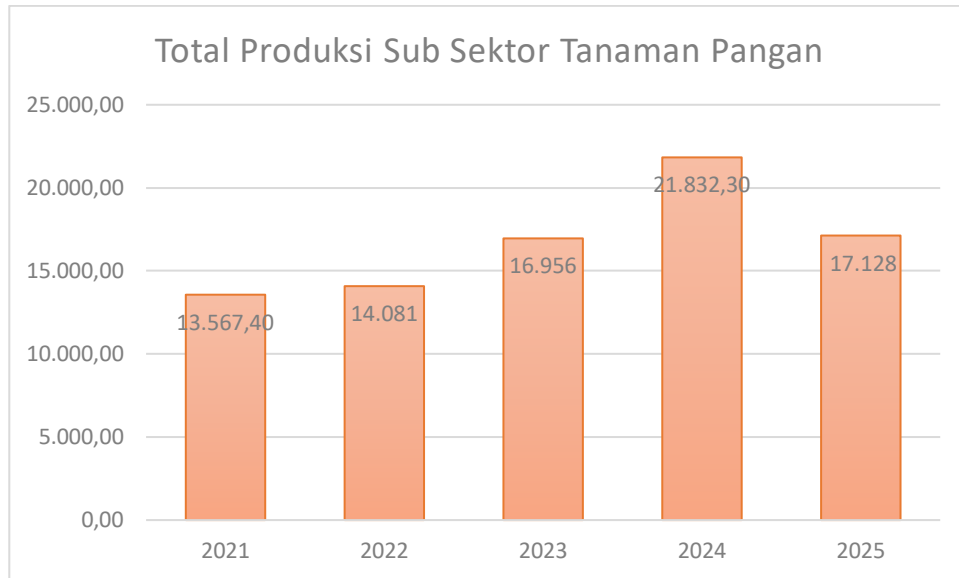
Selanjutnya, indikator persentase keamanan pangan Tahun 2025 sebesar 98,75%, sedikit menurun dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 100%. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya risiko keamanan pangan pada rantai distribusi serta belum meratanya penerapan standar keamanan pangan oleh pelaku usaha skala mikro. Upaya yang telah dilakukan antara lain penguatan pengawasan pangan segar, pengujian sampel, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Ke depan, diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan, digitalisasi pelaporan, dan perluasan edukasi keamanan pangan berbasis masyarakat.

Secara umum, kualitas konsumsi pangan masyarakat masih berada pada kategori cukup baik, namun diperlukan penguatan intervensi untuk meningkatkan konsumsi energi dan menjaga mutu serta keamanan pangan guna mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Sasaran 3: Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 capaian masing-masing indikator kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

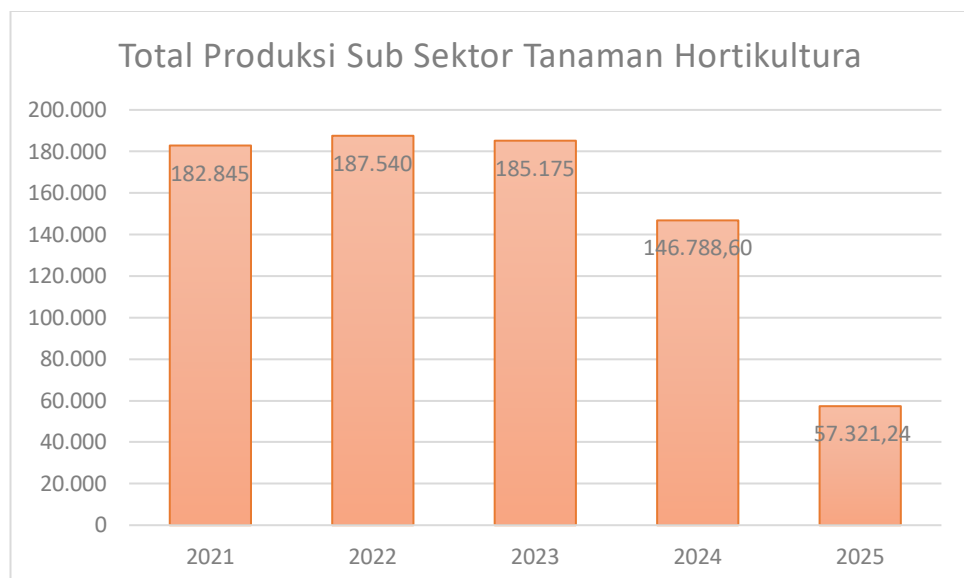
- Indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan mengalami penurunan sebesar 26,14% dibandingkan tahun 2024. Berikut adalah diagram perbandingan Indikator Kinerja Total Produksi Tanaman Pangan dari Tahun 2021-2025.



Gambar 3.3

Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dari Tahun 2021-2025

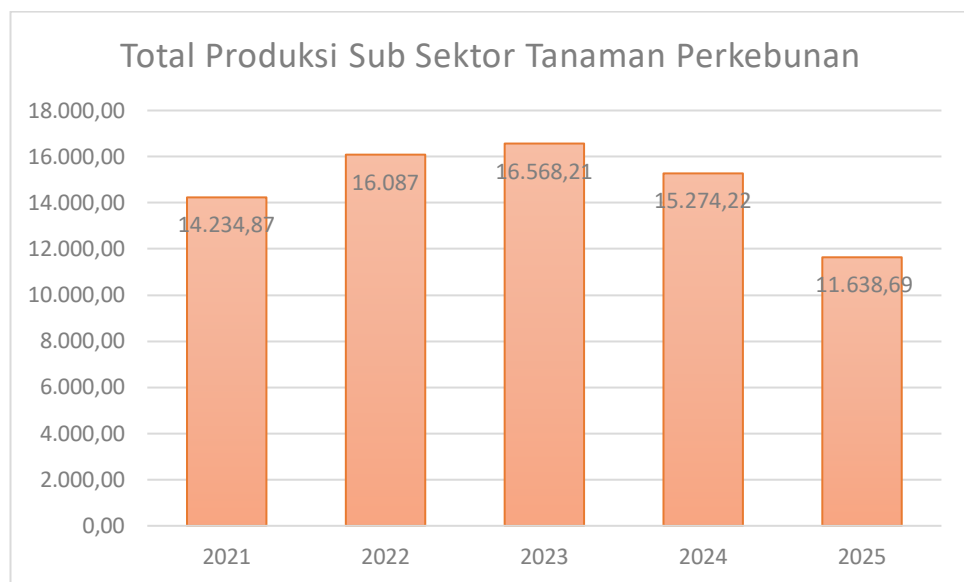
- Indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura mengalami penurunan sebesar 69,43% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Berikut adalah diagram perbandingan Indikator Kinerja Total Produksi Tanaman Hortikultura dari Tahun 2021-2025.



Gambar 3.4

Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dari Tahun 2021- 2025

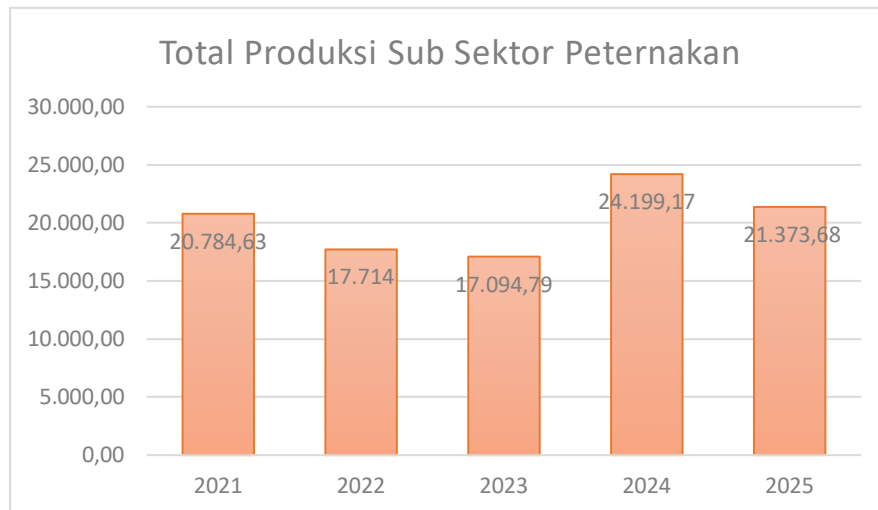
- Indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan juga mengalami penurunan 37,78% dibandingkan tahun 2024. Berikut adalah diagram perbandingan Indikator Kinerja Total Produksi Tanaman Perkebunan dari Tahun 2021-2025.



Gambar 3.5

Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan dari Tahun 2021- 2025

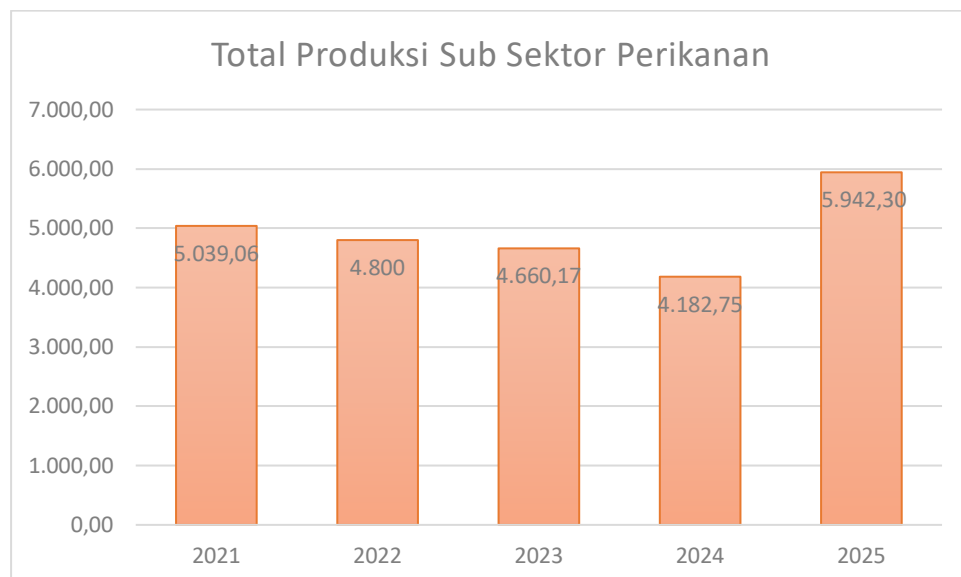
- Indikator Total Produksi Sub Sektor Peternakan mengalami penurunan sebesar 14,15%. Berikut adalah diagram perbandingan Indikator Kinerja Total Produksi Peternakan dari Tahun 2021-2025.



Gambar 3.6

Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Peternakan dari Tahun 2021-2025

- Indikator Total Produksi Sub Sektor Perikanan terjadi peningkatan sebesar -34,56% dibandingkan dengan tahun 2024. Berikut adalah diagram perbandingan Indikator Kinerja Total Produksi Perikanan dari Tahun 2021-2025.



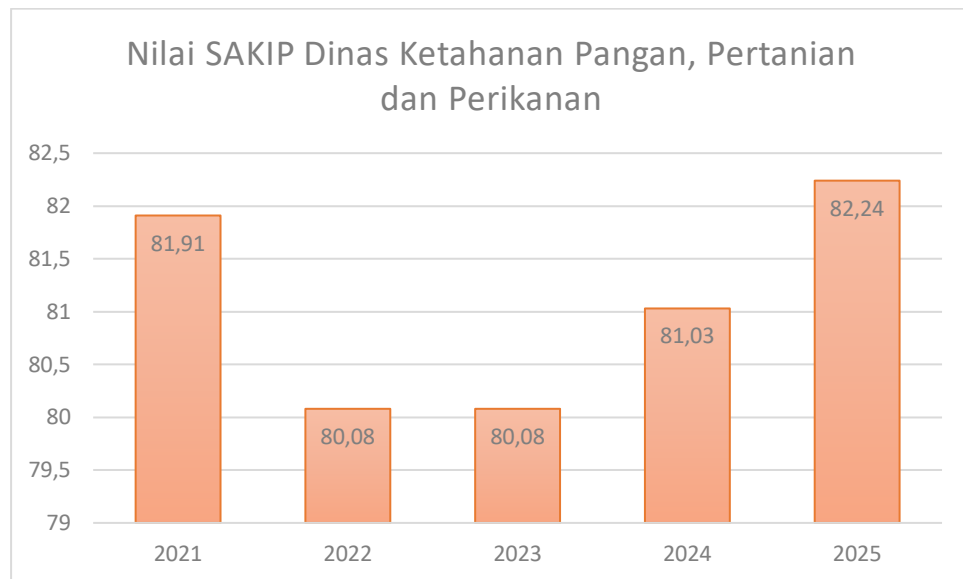
Gambar 3.7

Perbandingan Total Produksi Sub Sektor Perikanan dari Tahun 2021- 2025

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 capaian indikator untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan

indikatornya Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tahun 2024 Nilai SAKIP yang dicapai adalah 82,24 atau sekitar 100,66% dari target 81,7. Berikut adalah diagram perbandingan Nilai SAKIP yang dicapai dari tahun 2021-2025.



Gambar 3.8
Perbandingan Nilai SAKIP dari Tahun 2021- 2025

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan mengacu pada Renstra Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mengukur tingkat pencapaian indikator kinerja pada tahun awal implementasi Renstra. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan arah kebijakan serta kemajuan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode perencanaan terbaru.

Sehubungan dengan mulai berlakunya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 pada Tahun 2025, maka tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun dasar (baseline) bagi seluruh indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan dimaksud. Dengan demikian, belum tersedia data pembandingan capaian kinerja pada periode sebelum Tahun 2025 yang disusun berdasarkan kerangka perencanaan yang sama. Oleh karena itu, dalam penyajian tabel hanya ditampilkan target, realisasi, dan capaian Tahun 2025, sedangkan kolom tahun sebelumnya diberikan tanda (—

) untuk menunjukkan bahwa Renstra terbaru belum berlaku pada periode tersebut. Adapun rincian realisasi dan capaian kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	8,3	—	13,68	—	6,98	—	5,9	—	5,67	8,24	68,81%
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,10	—	85,2	—	88,6	—	87,35	—	87,35	90,85	104,01%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,91	—	80,08	99%	80,08	99%	81,03	99,42%	82,2	100,66	122,40%

Sumber : DKP3, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja indikator Tahun 2025 merupakan capaian yang targetnya telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang baik, bahkan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian realisasi pada tingkat tujuan dengan indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) sebesar 68,81% dengan predikat “Tidak Tercapai”, karena realisasi sebesar 8,24% masih berada di atas target 5,67%. Perlu diketahui bahwa indikator PoU merupakan indikator yang bersifat negatif, sehingga semakin tinggi nilai realisasi menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang semakin kurang baik. Selain itu, indikator PoU merupakan indikator baru dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025–2029, sehingga pada periode Tahun 2021–2024 belum tersedia baseline historis yang disusun dalam kerangka perencanaan yang sama. Dengan demikian, Tahun 2025 menjadi tahun dasar dalam pengukuran kinerja indikator tersebut.

Selanjutnya, capaian realisasi pada sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 104,01% dengan predikat “Melebihi Target”, yaitu realisasi sebesar 90,85 dari target 87,35. Indikator PPH juga merupakan indikator baru dalam Renstra Tahun 2025–2029, sehingga belum tersedia data capaian pada periode Tahun 2021–2024 yang dapat digunakan sebagai pembandingan dalam kerangka perencanaan sebelumnya.

Sementara itu, pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan capaian sebesar 100,66% dengan predikat “Melebihi Target”, yaitu realisasi sebesar 82,24 dari target 81,7. Berbeda dengan indikator lainnya, indikator Nilai AKIP telah menjadi indikator target dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2021–2026, sehingga memiliki data capaian historis yang dapat digunakan sebagai pembandingan dan menunjukkan tren peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari tahun ke tahun.

3.2.3. Perbandingan Realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Subbab ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari evaluasi kinerja berbasis hasil (result based performance). Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas

pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis serta mengukur kontribusi capaian kinerja tahunan terhadap target jangka menengah.

Tahun 2025 merupakan periode transisi antara Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029, sehingga analisis kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Capaian Tahun 2025 tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja terhadap target jangka menengah periode sebelumnya, tetapi juga sebagai baseline dalam implementasi Renstra periode terbaru. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, penguatan kualitas perencanaan berbasis data, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9 =6/8*100
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Persen	14%	12,61%	90,07	16%	78,81%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	Persen	95%	89,36%	94,06	95%	94,06%
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	Persen	100%	111,05%	111,05	100%	111,05%
		Persentase Keamanan Pangan	Persen	90%	98,74%	109,71	90%	109,71%
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18.000	17.128,00	95,16	89.300	19,18%
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	140.000	57.321,24	40,94	667.100	8,59%
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Ton	10.809	11.638,69	107,68	52.505	22,17%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	20.800	21.373,68	102,76	103.500	20,65%
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4.812	5.942,30	123,49	23.521	25,26%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Poin	81,70	82,24	100,66	82	100,29%

Sumber : Data diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (2026)

Sasaran 1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan data pada Tabel 3.8, capaian sasaran strategis Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tahun 2025 mencapai 12,61%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 16%, maka capaian tersebut setara dengan 78,81% dari target akhir Renstra.

Sasaran 2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman

Berdasarkan data pada Tabel 3.8 capaian realisasi masing-masing indikator untuk sasaran strategis Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Indikator Tingkat Konsumsi Energi/TKE adalah sebesar 89,36% dimana target akhir renstra yang telah ditentukan yaitu sebesar 95% dengan tingkat capaian terhadap akhir Renstra sebesar 94,06%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 95%, maka capaian tersebut setara dengan 94,06% dari target akhir Renstra.

- Indikator Tingkat Konsumsi Protein/TKP adalah sebesar 111,05% yang melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian terhadap akhir Renstra sebesar 111,05%.
- Indikator Persentase Keamanan Pangan didapatkan capaian sebesar 98,74% dimana capaian ini melebihi target akhir renstra sebesar 90% dengan tingkat capaian terhadap akhir Renstra sebesar 109,71%.

Sasaran 3. Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan

Berdasarkan data pada Tabel 3.8, capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan sampai dengan Tahun 2025 sebesar 17.128 ton. Capaian tersebut masih berada di bawah target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 89.300 ton, dengan tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 19,18%.
- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura sampai dengan Tahun 2025 sebesar 57.321,24 ton. Capaian ini belum memenuhi target akhir Renstra sebesar 667.100 ton, dengan tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 8,59%.
- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan sampai dengan Tahun 2025 sebesar 11.638,69 ton. Nilai tersebut masih berada di bawah target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 52.505 ton, dengan tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 22,17%.
- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Peternakan sampai dengan Tahun 2025 sebesar 21.373,68 ton. Capaian ini belum mencapai target akhir Renstra sebesar 103.500 ton, dengan tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 20,65%.
- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Perikanan sampai dengan Tahun 2025 sebesar 5.942,30 ton. Capaian tersebut masih berada di bawah target akhir Renstra sebesar 23.500 ton, dengan tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 25,26%.

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan data pada Tabel 3.8, capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebesar 82,24 poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 82 poin, maka tingkat capaian terhadap target akhir Renstra mencapai 100,29%.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan sebagai gambaran capaian kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Renstra periode terbaru. Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, sehingga menjadi tahun dasar (baseline) bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan tersebut.

Penyajian tabel berikut dimaksudkan untuk memberikan informasi awal mengenai tingkat pencapaian kinerja tahunan perangkat daerah, sekaligus menilai perkembangan awal terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan pada periode Renstra Tahun 2025–2029. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, perbaikan, dan penajaman strategi kinerja pada tahun-tahun selanjutnya dalam periode perencanaan yang sama, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	Nilai	5,67	8,24	68,81%	4,59	55,70%
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	87,35	90,85	104,01%	88,6	102,54%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,7	82,24	100,66%	83	99,08%

Sumber : Data diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (2026)

Tujuan Strategis : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Berdasarkan data pada Tabel 3.9, capaian tujuan strategis *Meningkatnya Ketahanan Pangan* dengan indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2025 sebesar 68,81%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2025–2029 sebesar 55,70%, maka capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa indikator PoU merupakan indikator yang bersifat negatif, sehingga semakin tinggi nilai realisasi menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang semakin kurang baik.

Sasaran 1. Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau

Berdasarkan data pada Tabel 3.9, capaian realisasi indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 mencapai 104,01%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 102,54%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan data pada Tabel 3.9, capaian realisasi indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 mencapai 100,66%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 99,08%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berada pada kategori baik dan mendekati target akhir yang ditetapkan.

3.2.4. Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (benchmark kinerja) disusun untuk menilai posisi capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolok ukur. Standar tersebut meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian kinerja pada tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, serta standar internasional yang relevan sesuai dengan karakteristik urusan pangan, pertanian, dan perikanan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja Tahun 2025 terhadap standar pelayanan minimal, capaian tingkat provinsi, nasional, serta indikator global yang relevan,

guna memastikan bahwa kinerja yang dicapai selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan standar yang berlaku.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada SPM, standar nasional, dan/atau internasional (benchmark kinerja) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja (SPM/Nasion al/Internasio nal/dll) 2025	Keterangan
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Persen	12,61%	50%	Sebagai pembanding, Kabupaten Minahasa menggunakan indikator persentase ketersediaan pangan dengan realisasi sebesar 50% pada tahun 2025. Indikator ini memiliki kesamaan konsep, namun cakupannya lebih luas, sehingga perbandingan kinerja perlu mempertimbangan perbedaan definisi dan cakupan indikator.
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	Persen	89,36%	98,73%	angka kota Balikpapan = 1.876,61 Kkal/kap/hari dibagi 2100 Kkal/kap/hari sedangkan angka nasional = 2073 kkal/kapita/hari dibagi /2100 Kkal/kap./hari Sumber : Badan Pangan Nasional (Skor PPH Nasional 2025 Meningkatkan, Konsumsi Pangan Makin Beragam)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/Internasional/dll) 2025	Keterangan
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	Persen	111,05%	110,18%	angka kota Balikpapan = 63,30 gram/kap/hari dibagi 57gram/kap/hari sedangkan angka nasional = 133,37 kkal/kapita/hari dibagi 57gram/kap/hari. Sumber : Badan Pangan Nasional (Skor PPH Nasional 2025 Meningkat, Konsumsi Pangan Makin Beragam)
		Persentase Keamanan Pangan	Persen	98,74%	26%	Berdasarkan LKjIP Kabupaten Minahasa Tahun 2025, realisasi indikator persentase keamanan pangan sebesar 26%
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	17.128 ton	76.366.267 ton	0,022 % dari Produksi Nasional yang dirilis oleh BPS (jumlah produksi hanya untuk tanaman padi dan Jagung)
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	57.321,24 ton	153.785,2 ton	37,27 % dari Produksi Provinsi Kaltim yang dirilis oleh Satu Data Kaltim (jumlah produksi hanya untuk buah-buahan, sayuran dan biofarmaka)
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Ton	11.638,69 ton	26.462.410 ton	0,04% dari realisasi tingkat Nasional. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun data produksi sub sektor tanaman perkebunan Tahun 2025 yang tersedia masih bersifat sementara

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja (SPM/Nasion al/Internasio nal/dll) 2025	Keterangan
						dan belum lengkap, karena baru mencakup periode hingga bulan Oktober 2025
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	21.373,68 ton	12.095.170 ton	0,177 % dari Produksi Provinsi Kaltim yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (jumlah produksi hanya daging sapi, unggas dan telur)
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	5.942,3 ton	18.647.007,91	0,032 % dari Produksi Nasional yang dirilis oleh KKP (jumlah produksi adalah angka estimasi)
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Poin	82,24	71,91	Nilai AKIP Kota Bontang

Sumber : Data Diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (2026)

Perbandingan Sasaran 1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Realisasi indikator sebesar 12,61%. Perbedaan capaian indikator antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa nilai kinerja sangat dipengaruhi oleh definisi dan cakupan indikator yang digunakan. Indikator persentase ketersediaan pangan di Kabupaten Minahasa mencerminkan kondisi kecukupan pangan secara umum, sedangkan indikator cadangan pangan pemerintah daerah di Kota Balikpapan lebih spesifik dan terbatas pada pengelolaan cadangan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perbedaan nilai capaian tidak dapat dibandingkan

secara langsung, namun lebih mencerminkan perbedaan pendekatan pengukuran kinerja antar daerah.

Perbandingan Sasaran 2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman

Berdasarkan data pada Tabel 3.10, realisasi Tingkat Konsumsi Energi (TKE) Kota Balikpapan sebesar 89,36% masih berada di bawah capaian nasional sebesar 98,73%, yang menunjukkan bahwa kecukupan energi masyarakat belum optimal sehingga memerlukan penguatan intervensi, khususnya dalam peningkatan akses dan keterjangkauan pangan bergizi. Sementara itu, Tingkat Konsumsi Protein (TKP) mencapai 111,05% dan lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 110,18%, yang mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi protein masyarakat relatif baik dan telah melampaui rata-rata nasional. Adapun Persentase Keamanan Pangan mencapai 98,74%, jauh lebih tinggi dibandingkan benchmark Kabupaten Minahasa sebesar 26%, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan pemenuhan standar keamanan pangan telah berjalan sangat efektif, meskipun perbedaan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh cakupan dan metode pengujian yang berbeda antar daerah.

Secara umum, capaian sasaran ini menunjukkan hasil yang baik, terutama pada aspek kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Namun demikian, pemenuhan konsumsi energi masih belum optimal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas konsumsi belum sepenuhnya diikuti oleh kecukupan kuantitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi pada aspek akses, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi energi masyarakat secara berkelanjutan.

Perbandingan Sasaran 3. Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan

Berdasarkan data pada Tabel 3.10, capaian sasaran strategis Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi antar subsektor.

Pada indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan, kontribusi Kota Balikpapan terhadap produksi nasional masih sangat kecil, yaitu sebesar 0,022%, yang mencerminkan keterbatasan kapasitas produksi akibat kondisi wilayah perkotaan dan keterbatasan lahan pertanian.

Sementara itu, pada indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura, capaian menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingkat provinsi, yaitu sebesar 37,27%. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor hortikultura memiliki potensi pengembangan yang lebih optimal dan relatif adaptif terhadap kondisi wilayah.

Untuk indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan, capaian belum dapat dibandingkan secara langsung dengan tingkat nasional maupun daerah lain, karena data pembandingan Tahun 2025 masih bersifat sementara dan belum tersedia secara lengkap.

Selanjutnya, pada indikator Total Produksi Sub Sektor Peternakan, kontribusi terhadap produksi provinsi masih relatif kecil, yaitu sebesar 0,177%, yang menunjukkan bahwa subsektor ini masih memiliki keterbatasan dalam skala produksi.

Adapun indikator Total Produksi Sub Sektor Perikanan menunjukkan kontribusi sebesar 0,032% terhadap produksi nasional, yang mengindikasikan bahwa subsektor perikanan belum menjadi sektor dominan, namun tetap memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

Secara umum, capaian pada sasaran ini menunjukkan bahwa produksi sumber daya pangan masih didominasi oleh subsektor tertentu, sementara subsektor lainnya masih memiliki keterbatasan kapasitas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi pada peningkatan produktivitas, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pengembangan subsektor yang memiliki potensi unggulan.

Perbandingan Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, realisasi Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan sebesar 82,24 lebih tinggi dibandingkan benchmark pembandingan, yaitu Nilai AKIP Kota Bontang sebesar 71,91. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola kinerja, perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja telah berjalan dengan baik dan perlu terus diperkuat melalui peningkatan integrasi perencanaan dan penganggaran serta kualitas evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan benchmark kinerja juga disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai bentuk upaya menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam pengukuran serta evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan, sekaligus menjadi dasar (baseline) dalam pengukuran kinerja pada periode perencanaan terbaru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi <i>Benchmark</i> Kinerja (SPM/Nasional/Internasional/dll) 2025	Keterangan
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	Persen	8,24	7,89	Realisasi Kota Balikpapan Tahun 2025 sebesar 8,24%,lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional sebesar 7,89%. Indikator PoU bersifat negatif, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Balikpapan masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	90,85	95,10	Realisasi Tahun 2025 sebesar 90,85 masih berada di bawah capaian tingkat nasional sebesar 95,10
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,24	71,91	Nilai AKIP Kota Bontang

Sumber : Data Diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (2026)

Perbandingan Tujuan Strategis : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Berdasarkan data pada Tabel 3.11, capaian tujuan strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2025 sebesar 8,24%, masih berada di atas benchmark tingkat nasional sebesar 7,89%. Mengingat indikator PoU bersifat negatif, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Balikpapan masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional,

Perbandingan Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau

Capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 sebesar 90,85, masih berada di bawah benchmark tingkat nasional sebesar 95,10. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat Kota Balikpapan belum optimal dibandingkan standar nasional.

Perbandingan Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, realisasi Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan sebesar 82,24 lebih tinggi dibandingkan benchmark pembanding, yaitu Nilai AKIP Kota Bontang sebesar 71,91. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola kinerja, perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja telah berjalan dengan baik dan perlu terus diperkuat melalui peningkatan integrasi perencanaan dan penganggaran serta kualitas evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Subbab ini memuat identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan, serta peningkatan atau penurunan capaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan melihat perkembangan capaian

kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, guna memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap dinamika kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan analisis mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, dapat diidentifikasi faktor pendukung yang mendorong keberhasilan capaian kinerja, sekaligus berbagai kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target.

Hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan alternatif solusi, langkah perbaikan, serta strategi tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, memperkuat kualitas perencanaan, serta mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal pada periode perencanaan berikutnya.

Adapun analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja Tahun 2025 beserta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Persen	14%	12,61%	90,07%	1. Proses pengadaan beras CPPD mengalami keterlambatan karena harus menunggu penyesuaian anggaran serta perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, belum adanya penetapan harga beras PSO menyebabkan proses administrasi dan pengadaan tidak dapat segera dilaksanakan pada awal tahun.	Upaya yang telah dilakukan antara lain penyesuaian harga pengadaan melalui APBD Perubahan serta koordinasi intensif dengan instansi terkait guna memastikan kepastian dasar hukum, harga acuan, dan mekanisme pengadaan sesuai ketentuan. Selain itu, dilakukan diversifikasi pengadaan cadangan pangan tidak hanya pada komoditas beras, tetapi juga sumber protein sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan dan dukungan terhadap	Menyusun perencanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) secara lebih antisipatif sejak awal tahun anggaran melalui skenario harga, kebutuhan stok, dan alokasi anggaran cadangan, memperkuat koordinasi lintas instansi terutama dengan Perum Bulog, serta melakukan diversifikasi komoditas cadangan pangan tidak hanya beras tetapi juga sumber protein guna mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan,

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
								percepatan penurunan stunting.	percepatan penurunan stunting, dan penguatan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
							2. Penutupan sementara pengadaan beras CPPD oleh Perum Bulog hingga terbitnya harga PSO terbaru menyebabkan pelaksanaan pengadaan tertunda dan baru dapat direalisasikan pada Triwulan IV.	Telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan Perum Bulog terkait penetapan harga beras PSO serta ketersediaan beras komersial (medium dan premium) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan terukur pada proses pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) selanjutnya.	Kebijakan untuk memilih beras komersial dalam pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) selanjutnya didasarkan pada pertimbangan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) beras komersial relatif stabil sepanjang tahun, sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan secara lebih terencana, tepat waktu, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							3. Karena belum tersedianya beras medium PSO, pengadaan menggunakan beras medium komersial dengan harga lebih tinggi, sehingga volume yang dapat dibeli menyesuaikan pagu anggaran dan menyebabkan realisasi persentase cadangan belum mencapai target.	Dilakukan penyesuaian spesifikasi dan harga pengadaan sesuai kondisi pasar, serta optimalisasi anggaran agar tetap dapat memenuhi sebagian kebutuhan cadangan pangan.	Penguatan perencanaan kebutuhan stok berbasis analisis risiko kerawanan pangan, penambahan alokasi anggaran secara bertahap, serta evaluasi target agar lebih realistis dengan mempertimbangkan fluktuasi harga dan kebijakan nasional.
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	Persen	95%	89,36%	94,06%	1. Penurunan Konsumsi Kelompok Padi-padian yang merupakan kontributor terbesar dalam perhitungan energi. Karena kontribusinya dominan, sedikit penurunan langsung berdampak	Telah dilakukan sosialisasi konsumsi pangan pokok yang cukup energi melalui edukasi gizi dan kegiatan promosi pola makan B2SA, serta pemantauan data konsumsi secara berkala untuk mengidentifikasi tren penurunan lebih dini.	Penguatan edukasi mengenai kecukupan energi harian yang seimbang, tidak hanya pada keberagaman pangan, agar diversifikasi tidak mengurangi total asupan energi yang dibutuhkan.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							signifikan terhadap capaian TKE.		
							2. Terjadi peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Pergeseran ini mencerminkan keberhasilan program diversifikasi pangan dan promosi B2SA, namun kontribusi energi dari kelompok tersebut belum sepenuhnya menggantikan energi dari padi-padian.	Dilaksanakan kampanye diversifikasi pangan lokal dan edukasi menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Penyusunan panduan menu diversifikasi yang tetap memenuhi kecukupan energi 2.100 Kkal/kapita/hari, sehingga perubahan pola konsumsi tetap sejalan dengan standar AKE.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							3. Faktor Perilaku dan Kesadaran Konsumsi Rumah Tangga yang mulai mengurangi konsumsi karbohidrat utama karena alasan gaya hidup atau persepsi diet tertentu, tanpa perhitungan kecukupan energi secara menyeluruh.	Dilakukan edukasi gizi keluarga dan sosialisasi pentingnya keseimbangan energi dan zat gizi dalam berbagai forum masyarakat.	Penguatan komunikasi perubahan perilaku berbasis data gizi, termasuk integrasi pesan kecukupan energi dalam program penanganan stunting dan ketahanan pangan keluarga.
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	Persen	100%	111,05%	111,05%	1. Efektivitas Program Peningkatan Konsumsi Protein melalui GEMARIKAN, Gerakan Gemar Makan Protein, serta kegiatan B2SA, yang dilaksanakan melalui edukasi dan kampanye konsumsi protein secara berkelanjutan	Telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi gizi di sekolah, kelompok masyarakat, serta keluarga berisiko stunting, disertai promosi menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis pangan lokal berprotein.	Memperluas jangkauan edukasi ke wilayah dengan konsumsi protein relatif rendah, memperkuat kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, PKK), serta memastikan kampanye dilakukan secara konsisten dan terukur dampaknya.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							2. Ketersediaan dan Aksesibilitas Sumber Protein Hewani relatif terjaga sepanjang tahun, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber protein	Dilakukan pembinaan pelaku usaha perikanan dan peternakan, pemantauan pasokan dan harga, serta dukungan terhadap produksi lokal guna menjaga stabilitas ketersediaan protein hewani.	Penguatan rantai pasok dan kemitraan produsen–distributor untuk menjaga stabilitas harga, serta pengembangan produk olahan protein yang lebih variatif agar konsumsi tetap meningkat tanpa bergantung pada satu jenis komoditas.
							3. Meningkatnya kesadaran gizi dan pola konsumsi keluarga, di mana masyarakat semakin memahami pentingnya asupan protein bagi pertumbuhan anak, pencegahan stunting, dan kesehatan keluarga, sehingga terjadi pergeseran pola konsumsi ke arah	Telah dilakukan kampanye berbasis keluarga dan komunitas, demonstrasi olahan pangan berprotein, serta integrasi pesan konsumsi protein dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Penguatan monitoring perubahan perilaku konsumsi secara berkala agar peningkatan ini berkelanjutan, serta pengembangan inovasi edukasi berbasis digital dan media sosial untuk menjangkau generasi muda.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							pangan yang lebih kaya protein.		
		Persentase Keamanan Pangan	Persen	90%	98,74%	109,71%	1. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan melalui pengujian sampel PSAT di pasar (post-market) dan pada pelaku usaha (pre-market) berjalan optimal dan sesuai rencana. 2. Penggunaan rapid test kit dalam pengujian lapangan mendukung pelaksanaan deteksi dini secara cepat dan efektif.	Menyusun dan melaksanakan rencana sampling PSAT di pasar (post-market) dan pada pelaku usaha (pre-market) sesuai target dan jadwal. Melaksanakan pengujian lapangan menggunakan rapid test kit sebagai metode deteksi dini terhadap parameter keamanan pangan.	Penguatan perencanaan sampling berbasis risiko agar pengawasan pre-market dan post-market semakin tepat sasaran dan efektif dalam mendeteksi potensi ketidaksesuaian keamanan pangan secara proporsional. Melakukan optimalisasi penggunaan rapid test kit melalui pengawasan masa berlaku, penyimpanan sesuai ketentuan, kepatuhan prosedur pengujian, serta peningkatan kompetensi petugas.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							3. Koordinasi dengan laboratorium penguji dan instansi terkait berjalan efektif untuk konfirmasi hasil tertentu.	Melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel PSAT sebagai tindak lanjut hasil pengawasan serta dalam rangka pemenuhan komitmen pelaku usaha pada proses Registrasi PSAT-PDUK	Peningkatan sinergi dengan laboratorium penguji, baik dalam tindak lanjut hasil pengawasan maupun pemenuhan komitmen Registrasi PSAT-PDUK, guna menjaga ketepatan waktu dan akurasi hasil uji.
							4. Seluruh tahapan sampling, pengujian, dan pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku	Melaksanakan pencatatan, pelaporan hasil pengujian, serta pembinaan dan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.	Penguatan pencatatan dan pelaporan hasil pengujian agar lebih tertib dan mudah ditelusuri dalam pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT.
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18.000	17.128,00	95,16%	1. Terjadi pengurangan luas lahan tanam akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, infrastruktur, dan kegiatan non-pertanian lainnya,	Dilakukan optimalisasi lahan eksisting melalui peningkatan indeks pertanaman, pendampingan pemanfaatan pekarangan, serta identifikasi lahan potensial yang masih	Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan, penetapan dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, serta penyusunan peta lahan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							sehingga luas panen beberapa komoditas (terutama ubi kayu dan jagung) menurun pada awal tahun.	dapat dikembangkan untuk tanaman pangan.	baku pertanian yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan produksi.
							2. Minat petani dalam menanam komoditas tertentu dipengaruhi oleh harga jual dan kepastian pasar. Pada saat harga kurang menarik, sebagian petani beralih ke komoditas lain atau tidak melakukan penanaman optimal.	Dilaksanakan pendampingan penyusunan rencana usaha tani, fasilitasi informasi harga pasar, serta dukungan sarana produksi (pupuk bersubsidi dan bantuan benih) untuk meningkatkan motivasi dan keberlanjutan usaha tani.	Penguatan kemitraan pemasaran dan skema off-taker agar harga lebih stabil, serta pengembangan pola tanam berbasis kebutuhan pasar untuk menjaga kesinambungan produksi dan pendapatan petani.
							3. Curah hujan tinggi dan kondisi cuaca ekstrem yang menghambat pemupukan, pengendalian organisme pengganggu	Telah diberikan bantuan benih unggul pada musim tanam tertentu serta fasilitasi akses petani terhadap distributor benih resmi.	Penguatan kelembagaan petani (kelompok tani/gapoktan) agar mampu melakukan pengadaan benih secara kolektif, pengembangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							tanaman (OPT), serta meningkatkan serangan penyakit tanaman.		penangkar benih lokal, serta fasilitasi akses pembiayaan usaha tani.
							4. Perubahan pola musim pada awal tahun mempengaruhi jadwal tanam dan panen sehingga realisasi produksi belum sepenuhnya mencapai target tahunan.	Dilakukan penyesuaian kalender tanam melalui pendampingan penyuluh pertanian serta pemantauan rutin perkembangan tanaman di lapangan.	Penguatan sistem informasi iklim dan early warning system, serta peningkatan kapasitas petani dalam adaptasi perubahan iklim untuk menjaga stabilitas produksi.
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	140.000	57.321,24	40,94%	1. Masifnya alih fungsi lahan di wilayah perkotaan yang mengurangi luas usaha tani hortikultura dan mendorong sebagian petani beralih profesi atau berpindah lokasi usaha.	Dilakukan optimalisasi pemanfaatan lahan eksisting melalui pendampingan intensif, pengembangan budidaya skala pekarangan, serta fasilitasi sarana produksi bagi kelompok tani yang masih aktif.	Mendorong perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan kawasan hortikultura berbasis klaster, serta peningkatan intensifikasi dan indeks pertanaman guna menjaga keberlanjutan produksi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
									di tengah keterbatasan lahan.
							2. Regenerasi petani berjalan lambat sehingga usaha tani didominasi petani berusia lanjut dengan keterbatasan tenaga dan kemampuan pengelolaan lahan.	Dilakukan pembinaan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan kepada petani aktif serta fasilitasi pelatihan budidaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha tani.	Mendorong program regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda, pelatihan kewirausahaan hortikultura, serta dukungan akses sarana dan pasar agar sektor hortikultura lebih menarik dan berkelanjutan.
							3. Curah hujan tinggi dan kondisi cuaca ekstrem yang menghambat pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta meningkatkan serangan penyakit tanaman, termasuk serangan Patek pada	Dilakukan monitoring lapangan, pendampingan teknis pengendalian OPT, serta penyesuaian jadwal pemeliharaan tanaman untuk meminimalkan risiko kerugian produksi.	Mengembangkan budidaya hortikultura adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk penggunaan varietas tahan penyakit, penguatan sistem peringatan dini OPT, serta peningkatan sarana pendukung seperti drainase dan rumah lindung tanaman.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							cabai, sehingga menurunkan hasil panen.		
							4. Sebagian tanaman buah tahunan belum memasuki fase produktif dan siklus pembungaan sangat dipengaruhi musim, sehingga capaian produksi pada periode pelaporan belum optimal.	Dilakukan pemeliharaan dan pemantauan intensif terhadap tanaman buah tahunan serta pendampingan teknis untuk menjaga kesehatan tanaman hingga memasuki fase berbuah.	Menyusun proyeksi produksi berbasis siklus tanaman dan musim, serta meningkatkan manajemen budidaya dan pemeliharaan agar produktivitas tanaman buah tahunan dapat lebih stabil dan terprediksi.
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Ton	10.809	11.638,69	107,68%	1. Secara umum produksi tanaman perkebunan berada dalam kondisi stabil sepanjang tahun, sehingga meskipun terdapat kendala pada komoditas tertentu, kontribusi komoditas lainnya tetap mampu menjaga bahkan	Dilakukan pembinaan teknis dan monitoring rutin terhadap kelompok tani perkebunan untuk menjaga kontinuitas pemeliharaan tanaman serta memastikan panen dilakukan sesuai siklus produksi.	Penguatan perencanaan produksi berbasis komoditas unggulan daerah serta peningkatan produktivitas melalui peremajaan tanaman dan penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							meningkatkan total produksi hingga melampaui target.		
							2. Pengendalian Dampak Curah Hujan Tinggi terhadap Produktivitas sehingga tidak menurunkan total produksi secara signifikan.	Dilakukan pendampingan teknis terkait pengendalian penyakit tanaman dan penyesuaian jadwal penyadapan pada kondisi cuaca kurang mendukung.	Penerapan sistem budidaya adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk penggunaan klon unggul tahan penyakit, peningkatan sanitasi kebun, serta penguatan sistem informasi iklim untuk mendukung perencanaan panen.
							3. Adanya pembinaan berkelanjutan kepada pekebun dan penguatan kelembagaan kelompok tani berkontribusi terhadap konsistensi pemeliharaan dan peningkatan hasil produksi.	Telah dilakukan fasilitasi pelatihan budidaya, penguatan kelompok tani, serta koordinasi dalam pengelolaan hasil panen dan pemasaran.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun dalam aspek manajemen usaha dan akses pasar, termasuk mendorong kemitraan dan hilirisasi produk agar nilai tambah meningkat seiring stabilnya produksi.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	20.800	21.373,68	102,76%	1. Produksi meningkat pada periode Ramadan–Idulfitri, Maulid Nabi, menjelang akhir tahun, serta musim hajatan, yang mendorong kenaikan pemotongan dan distribusi produk peternakan. Lonjakan permintaan musiman ini memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian tahunan.	Dilakukan pengaturan suplai ternak dan koordinasi dengan pelaku usaha agar ketersediaan hewan potong tetap terjaga pada periode puncak permintaan, termasuk pemantauan stok dan harga.	Penyusunan proyeksi kebutuhan berbasis kalender musiman serta penguatan sistem logistik dan cadangan ternak untuk menjaga stabilitas produksi tanpa menimbulkan gejolak harga.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							2. Kemampuan Produksi Menyesuaikan Fluktuasi Permintaan. Meskipun terjadi penurunan aktivitas pemotongan pada periode non-momentum, pelaku usaha peternakan mampu menjaga populasi dan kesiapan produksi sehingga secara kumulatif target tahunan tetap terlampai.	Dilakukan pembinaan teknis dan monitoring populasi ternak untuk memastikan siklus pemeliharaan tetap berjalan dan tidak terjadi kekosongan pasokan saat permintaan kembali meningkat.	Penguatan manajemen usaha ternak berbasis perencanaan produksi jangka menengah agar fluktuasi permintaan tidak berdampak signifikan pada kestabilan pendapatan peternak.
							3. Pada periode tertentu terjadi pelemahan animo konsumsi daging segar serta pergeseran preferensi ke produk olahan atau sumber protein lain. Namun,	Dilakukan promosi konsumsi produk peternakan serta pengawasan keamanan pangan asal hewan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk.	Pengembangan diversifikasi produk olahan hasil ternak dan penguatan pemasaran berbasis nilai tambah agar konsumsi lebih merata sepanjang tahun dan tidak hanya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							dampak tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan permintaan pada periode puncak, sehingga realisasi tahunan tetap melampaui target.		bergantung pada momentum musiman.
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4.812	5.942,30	123,49%	1. Terjadi peningkatan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) serta penambahan armada penangkapan pada awal tahun, seiring masuknya musim penangkapan. Hal ini mendorong kenaikan produksi perikanan tangkap secara signifikan.	Dilakukan pembinaan kepada nelayan dan fasilitasi sarana penangkapan, serta pendataan dan monitoring RTP untuk memastikan kapasitas produksi tetap terjaga.	Penguatan manajemen usaha nelayan melalui akses pembiayaan, peningkatan teknologi tangkap ramah lingkungan, serta pengembangan sistem pencatatan produksi yang lebih akurat dan terintegrasi.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							2. Bertambahnya Rumah Tangga Pembudidaya serta diversifikasi komoditas, termasuk pengembangan rumput laut air payau (Gracilaria), memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi budidaya pada triwulan II dan III.	Dilakukan pendampingan teknis budidaya, fasilitasi sarana produksi, serta pengembangan komoditas potensial untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.	Penguatan hilirisasi produk budidaya melalui peningkatan kualitas pascapanen dan pengembangan kemitraan pemasaran, yang didukung oleh upaya peningkatan produksi melalui pendampingan dan pembinaan pembudidaya serta fasilitasi sarana budi daya seperti bantuan pakan dan bibit ikan
							3. Pada triwulan IV terjadi penurunan produksi perikanan tangkap akibat kondisi cuaca yang membatasi aktivitas melaut. Namun penurunan tersebut dapat diimbangi oleh meningkatnya produksi perikanan budidaya, sehingga	Dilakukan monitoring kondisi cuaca dan pembinaan nelayan terkait keselamatan melaut, serta penguatan produksi budidaya sebagai penopang ketika tangkap menurun.	Pengembangan sistem informasi cuaca dan peringatan dini bagi nelayan, serta strategi penyeimbangan produksi antara tangkap dan budidaya agar sektor perikanan lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							total produksi tahunan tetap melampaui target.		
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Poin	81,70	82,24	100,66%	1. Terjadi peningkatan konsistensi antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan pelaporan, sehingga indikator kinerja lebih terukur dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.	Dilakukan revidi internal terhadap dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta penyempurnaan cascading kinerja hingga level eselon dan pelaksana.	Penguatan integrasi perencanaan berbasis outcome dan peningkatan kualitas indikator agar lebih fokus pada dampak, bukan hanya output kegiatan.
							2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik memungkinkan identifikasi deviasi capaian lebih dini, sehingga dapat dilakukan langkah korektif sebelum	Telah dilaksanakan rapat evaluasi berkala, pemantauan realisasi fisik dan keuangan, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih sistematis dan berbasis data.	Pengembangan sistem monitoring berbasis digital/dashboard kinerja agar proses evaluasi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							akhir tahun anggaran.		
							3. Adanya komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh unit kerja dalam penerapan SAKIP mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, sehingga perangkat daerah berhasil meraih predikat A.	Dilakukan pembinaan internal, koordinasi lintas bidang, serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap implementasi SAKIP.	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis penyusunan indikator dan analisis kinerja, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja agar capaian predikat A dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Sumber : Data Diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (2026)

Sasaran 1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Capaian indikator Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah Tahun 2025 sebesar 12,61% atau 90,07% dari target dipengaruhi oleh dinamika kebijakan harga dan mekanisme pengadaan beras CPPD. Ketidakpastian penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta harga beras PSO pada awal tahun menghambat proses administrasi dan kontraktual, sehingga pelaksanaan pengadaan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Selain itu, penutupan sementara pengadaan oleh Perum Bulog hingga terbitnya kebijakan harga terbaru menyebabkan realisasi pengadaan baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV. Keterbatasan ketersediaan beras medium PSO juga mendorong penggunaan beras komersial dengan harga yang lebih tinggi, sehingga volume pengadaan harus disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, perangkat daerah melakukan penyesuaian harga dan spesifikasi pengadaan melalui APBD Perubahan. Anggaran belanja beras pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp296.540.160 kemudian ditambah pada APBD Perubahan menjadi Rp302.592.000. Penambahan anggaran ini dilakukan sebagai tindak lanjut penyesuaian harga beras berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional, dari semula Rp12.348/kg menjadi Rp12.608/kg. Selain itu, dilakukan optimalisasi alokasi anggaran serta koordinasi intensif dengan Perum Bulog dan instansi terkait guna memastikan kepastian harga, ketersediaan komoditas, dan kelancaran proses pengadaan. Upaya lain yang dilakukan yaitu penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam validasi data sasaran serta distribusi cadangan pangan agar tepat sasaran.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota Balikpapan juga mengembangkan diversifikasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui pengadaan paket protein. Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada rumah tangga pada desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta perluasan jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagai kelompok prioritas intervensi. Penetapan sasaran penerima CPPD protein dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penerima Paket CPPD Protein Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor

400.9.12.1-137/DP3AKB-KK tanggal 28 Mei 2025, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

The image displays a multi-page document. The top portion features several tables with the following columns: 'No', 'Nama', 'NIK', 'Kecamatan', and 'Kabupaten'. These tables contain lists of names and identification numbers. Below the tables, there are sections with handwritten signatures and official stamps. A prominent section on the right side includes multiple rows of signatures and dates, likely representing a list of approvals or a timeline of events. The document is titled 'Berita Acara Penetapan Penerima Paket CPPD Protein Kota Balikpapan Tahun 2025' and is dated '28 Mei 2025'.

Gambar 3.9

Berita Acara Penetapan Penerima Paket CPPD Protein Kota Balikpapan Tahun 2025 nomr 400.9.12.1-137/DP3AKB-KK tanggal 28 Mei 2025

Selanjutnya, kegiatan penyaluran CPPD protein dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Balikpapan dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dokumentasi kegiatan penyaluran CPPD protein sebagai bentuk eviden pelaksanaan intervensi disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.10
 Penyaluran CPPD Paket Protein (Ayam dan Telur) di 34 Kelurahan
 Kota Balikpapan
 Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, dalam rangka memastikan kelancaran proses pengadaan CPPD komoditas beras, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan juga melaksanakan rapat koordinasi bersama Perum Bulog Kota Balikpapan yang melibatkan Direktur Pengadaan dan Manajemen Stok (PMS) serta Asisten Manager Bulog sebagai mitra strategis dalam penyediaan dan pengelolaan stok pangan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh kepastian terkait ketersediaan komoditas, mekanisme pengadaan, penyesuaian harga, serta penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.11

Rapat koordinasi terkait pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan stok berbasis analisis risiko, penyusunan skenario harga sejak awal tahun, serta peningkatan fleksibilitas kebijakan pengadaan agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan kebijakan nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pengadaan, menjaga stabilitas cadangan pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman

- Capaian indikator Tingkat Konsumsi Energi (TKE) Tahun 2025 sebesar 89,36% atau 94,06% dari target menunjukkan bahwa kecukupan energi masyarakat belum optimal dan masih berada di bawah standar kebutuhan yang dianjurkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penurunan konsumsi kelompok padi-padian sebagai sumber utama energi, pergeseran pola konsumsi menuju pangan lokal seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, dan buah yang memiliki kontribusi energi relatif lebih rendah, serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang mulai membatasi asupan

karbohidrat tanpa memperhatikan kecukupan energi secara menyeluruh. Pergeseran pola konsumsi tersebut merupakan dampak positif dari keberhasilan program diversifikasi pangan, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan total asupan energi. Sebagai upaya perbaikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai intervensi melalui sosialisasi dan edukasi gizi, promosi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), kampanye diversifikasi pangan lokal, pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan menu sehat, serta pemantauan data konsumsi pangan secara berkala guna mengidentifikasi tren penurunan kecukupan energi secara dini. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dan menyasar kelompok masyarakat secara luas, mulai dari usia dini, keluarga, hingga komunitas. Dokumentasi kegiatan disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.12

Dokumentasi sosialisasi B2SA di sekolah sebagai upaya edukasi sejak usia dini dalam membentuk pola konsumsi pangan beragam dan bergizi.

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan



Gambar 3.13

Sosialisasi B2SA di Taman Bekapai yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Dinas Kesehatan melalui kegiatan Gempur Stunting.
Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan



Gambar 3.14

Sosialisasi B2SA bersama TP PKK Kelurahan Batu Ampar dalam rangka penguatan edukasi konsumsi pangan pada tingkat keluarga dan komunitas.

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan



Gambar 3.15

Sosialisasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui Lomba B2SA yang dilaksanakan bekerja sama dengan TP PKK Kota Balikpapan

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, dilakukan penguatan komunikasi perubahan perilaku melalui forum masyarakat, integrasi pesan kecukupan energi dalam program penanganan stunting, serta peningkatan literasi gizi keluarga berbasis data konsumsi pangan.



Gambar 3.16

Penandatanganan komitmen dukungan kebijakan edukasi konsumsi B2SA dan Stop Boros Pangan antara DPTP Provinsi dengan TP PKK Provinsi, Persit, Bhayangkari, serta organisasi mitra lainnya
Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Ke depan, diperlukan penguatan intervensi melalui penyusunan panduan menu diversifikasi pangan yang tetap memenuhi standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, peningkatan literasi gizi masyarakat, serta integrasi program edukasi konsumsi pangan dengan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

- Capaian indikator Tingkat Konsumsi Protein (TKP) Tahun 2025 mencapai 111,05% atau berada pada kategori melebihi target. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecukupan konsumsi protein masyarakat Kota Balikpapan relatif baik dan telah melampaui standar Angka Kecukupan Protein yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh efektivitas program peningkatan konsumsi protein melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) serta kegiatan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan dan aksesibilitas sumber protein hewani relatif terjaga sepanjang tahun, didukung oleh stabilitas pasokan, pembinaan pelaku usaha perikanan dan peternakan, serta penguatan produksi lokal. Peningkatan capaian

juga didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi protein dalam mendukung pertumbuhan anak, pencegahan stunting, dan kesehatan keluarga. Hal ini terlihat dari perubahan pola konsumsi keluarga yang semakin mengarah pada pangan sumber protein.

Upaya yang telah dilakukan dilaksanakan secara terpadu bersama intervensi peningkatan kecukupan energi, antara lain melalui sosialisasi dan edukasi gizi, promosi konsumsi pangan B2SA, kampanye diversifikasi pangan lokal, pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan menu sehat, serta pemantauan data konsumsi pangan secara berkala. Sebagai bagian dari penguatan konsumsi protein hewani, kegiatan GEMARIKAN dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan perubahan perilaku konsumsi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan dan keluarga berisiko stunting. Dokumentasi kegiatan disajikan sebagai berikut.



Gambar 3.17

Kegiatan sosialisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka mendukung program Gempur Stunting

Sumber : Bidang Perikanan DKP3 Kota Balikpapan

Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Kesehatan, TP PKK, dan kelompok masyarakat, termasuk integrasi pesan konsumsi protein dalam program penanganan stunting, edukasi keluarga, serta kegiatan di sekolah dan komunitas. Ke depan, diperlukan penguatan intervensi melalui perluasan jangkauan edukasi pada wilayah dengan tingkat konsumsi protein yang masih rendah, pengembangan inovasi edukasi berbasis digital, serta peningkatan literasi gizi keluarga agar perubahan perilaku konsumsi protein dapat berlangsung secara

berkelanjutan. Selain itu, penguatan rantai pasok, stabilisasi harga, serta pengembangan produk olahan protein lokal yang variatif perlu terus ditingkatkan guna menjaga akses masyarakat terhadap sumber protein secara merata dan mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

- Capaian indikator Persentase Keamanan Pangan Tahun 2025 mencapai 98,74% atau 109,71% dari target, sehingga berada pada kategori melebihi target. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan keamanan pangan di Kota Balikpapan telah berjalan secara optimal dan efektif, khususnya dalam menjamin keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar di masyarakat. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang terencana, sistematis, serta dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Optimalnya capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan sampling dan pengujian keamanan pangan secara rutin di pasar, sentra distribusi, serta pada pelaku usaha, penggunaan rapid test kit sebagai metode deteksi dini di lapangan, serta penguatan koordinasi dengan laboratorium penguji dalam rangka konfirmasi hasil pengujian. Selain itu, seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan, pengambilan sampel, pengujian, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan telah dilaksanakan sesuai standar mutu dan prinsip pengawasan keamanan pangan.

Upaya yang telah dilakukan meliputi penyusunan rencana sampling berbasis target dan wilayah prioritas, pelaksanaan pengujian lapangan menggunakan rapid test kit, serta pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan proses registrasi PSAT-PDUK. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara kolaboratif dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mendukung perlindungan konsumen.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan keamanan pangan berbasis risiko, pengawasan juga diperluas pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari intervensi penanganan stunting. Kegiatan ini meliputi inspeksi lapangan, pengambilan contoh pangan, serta pengujian cepat (rapid

test) guna memastikan keamanan dan mutu pangan yang disalurkan kepada kelompok sasaran. Dokumentasi kegiatan pengawasan keamanan pangan pada SPPG disajikan sebagai berikut.



Gambar 3.18

Pengawasan keamanan pangan segar dan pengujian *rapid test* pada SPPG I, II, dan III wilayah Balikpapan Selatan
Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan



Gambar 3.19

Pengawasan keamanan pangan pada SPPG Pold Kalimantan Timur, SPPG 4, dan SPPG 5 wilayah Balikpapan Selatan

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Kegiatan ini menunjukkan penguatan sinergi lintas sektor antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan. Pendekatan kolaboratif tersebut juga mendukung integrasi program ketahanan pangan dan percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan penguatan pengawasan berbasis risiko melalui pemetaan wilayah dan komoditas prioritas, optimalisasi penggunaan rapid test kit dengan peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan sinergi dengan laboratorium penguji untuk menjaga ketepatan waktu dan akurasi hasil uji. Selain itu, peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan pengawasan keamanan pangan perlu terus dilakukan agar sistem monitoring dan evaluasi semakin akuntabel dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan

- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2025 sebesar 17.128 ton atau 95,16% dari target menunjukkan bahwa produksi tanaman pangan relatif baik, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya luas lahan tanam akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, infrastruktur, dan kegiatan non-pertanian. Penurunan luas panen terutama terjadi pada komoditas jagung dan singkong pada awal tahun, sehingga berdampak pada penurunan produksi. Selain itu, minat petani dalam menanam komoditas tanaman pangan juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga serta kepastian pasar, sehingga sebagian petani beralih pada komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan.

Faktor lain yang mempengaruhi capaian produksi adalah curah hujan tinggi dan kondisi cuaca ekstrem yang menghambat kegiatan budidaya, seperti pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit. Perubahan pola musim pada awal tahun juga berdampak pada penyesuaian jadwal tanam dan panen, sehingga realisasi produksi belum optimal pada beberapa periode tanam.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan tanaman pangan melalui peningkatan indeks pertanaman, khususnya pada komoditas padi, serta pendampingan pengelolaan lahan secara intensif. Selain itu, dilakukan fasilitasi penyediaan sarana produksi berupa benih unggul padi, jagung, dan singkong, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Pendampingan teknis juga dilakukan melalui penguatan peran penyuluh pertanian dalam penyusunan rencana tanam, penyesuaian kalender tanam berbasis kondisi iklim, serta pemantauan perkembangan tanaman secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan usaha tani terhadap risiko perubahan iklim, menekan serangan OPT, serta menjaga stabilitas produksi tanaman pangan.

Sebagai bentuk implementasi pendampingan teknis tersebut, kegiatan penyuluhan budidaya tanaman pangan dilaksanakan secara berkelanjutan kepada kelompok tani padi, jagung, dan singkong. Dokumentasi kegiatan disajikan sebagai berikut.



Gambar 3.20

Pendampingan dan penyuluhan budidaya tanaman pangan (padi, jagung, dan singkong) kepada kelompok tani

Sumber : Penyuluh Pertanian DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, dilakukan fasilitasi penyediaan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



Gambar 3.21

Penyaluran bantuan benih jagung kepada kelompok tani.

Sumber : Penyuluh Pertanian DKP3 Kota Balikpapan

Ke depan, diperlukan penguatan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, peningkatan efisiensi penggunaan sarana produksi, serta penguatan kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan usaha tani. Selain itu, pengembangan sistem informasi iklim, early warning system, serta peningkatan kapasitas petani dalam adaptasi perubahan iklim menjadi prioritas guna menjaga keberlanjutan produksi padi, jagung, dan singkong sebagai komoditas strategis ketahanan pangan daerah.

- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahun 2025 sebesar 57.321,24 ton atau 40,94% dari target menunjukkan bahwa produksi

hortikultura belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya alih fungsi lahan di wilayah perkotaan yang mengurangi luas usaha tani hortikultura serta mendorong sebagian petani beralih profesi atau berpindah lokasi usaha. Selain itu, proses regenerasi petani berjalan relatif lambat sehingga usaha tani hortikultura masih didominasi oleh petani berusia lanjut dengan keterbatasan tenaga dan kemampuan dalam pengelolaan usaha tani.

Faktor iklim juga memberikan pengaruh signifikan, dimana curah hujan tinggi dan kondisi cuaca ekstrem menghambat kegiatan pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta meningkatkan risiko serangan penyakit, seperti Patek pada cabai. Selain itu, sebagian tanaman buah tahunan belum memasuki fase produktif, sehingga capaian produksi pada periode pelaporan belum optimal.

Untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan eksisting melalui pengembangan budidaya hortikultura skala pekarangan dan urban farming guna meningkatkan produksi serta ketersediaan pangan lokal di wilayah perkotaan.



Gambar 3.22

Pengembangan hortikultura berbasis pekarangan dan urban farming sebagai upaya optimalisasi lahan di wilayah perkotaan.

Sumber : Penyuluh Pertanian DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, dilakukan fasilitasi sarana produksi bagi kelompok tani aktif berupa benih sayuran, pupuk, dan pestisida ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.



Gambar 3.23

Penyaluran sarana produksi berupa benih tanaman hortikultura kepada kelompok tani.

Sumber : Penyuluh Pertanian DKP3 Kota Balikpapan

Pendampingan teknis juga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penyuluhan budidaya hortikultura, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan manajemen usaha tani guna mendukung keberlanjutan produksi.



Gambar 3.24

Pelatihan dan pendampingan teknis budidaya hortikultura kepada masyarakat.

Sumber : Penyuluh Pertanian DKP3 Kota Balikpapan

Untuk mengurangi risiko kegagalan produksi akibat perubahan iklim dan serangan hama, dilakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu, termasuk pendampingan penggunaan pestisida ramah lingkungan serta monitoring kondisi tanaman secara berkala.



Gambar 3.25

Pendampingan dan Gerakan Pengendalian OPT hortikultura di Kelurahan Manggar Baru dengan penggunaan bahan ramah lingkungan sebagai upaya menekan serangan hama dan penyakit tanaman.

Sumber : Bidang Perkebunan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, dilakukan monitoring lapangan dan pemeliharaan tanaman buah tahunan untuk menjaga kesehatan tanaman hingga memasuki fase produktif, sehingga dapat meningkatkan kontribusi produksi pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 3.26

Monitoring dan pemeliharaan tanaman buah tahunan dalam rangka menjaga keberlanjutan dan produktivitas jangka panjang.

Sumber : Bidang PTP DKP3 Kota Balikpapan

Ke depan, diperlukan penguatan perlindungan lahan hortikultura, pengembangan kawasan berbasis klaster, serta peningkatan indeks pertanian guna menjaga keberlanjutan produksi. Selain itu, perlu penguatan regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda, pengembangan kewirausahaan hortikultura, serta dukungan akses pasar dan teknologi. Adaptasi perubahan iklim melalui penggunaan varietas tahan penyakit, sistem peringatan dini OPT, serta peningkatan sarana pendukung seperti rumah lindung tanaman juga menjadi prioritas untuk meningkatkan stabilitas produksi hortikultura.

- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan Tahun 2025 sebesar 11.638,69 ton atau 107,68% dari target, menunjukkan bahwa produksi perkebunan berada pada kondisi stabil dan mampu melampaui target yang

ditetapkan. Secara umum, stabilitas produksi dipengaruhi oleh kontribusi berbagai komoditas unggulan perkebunan yang tetap terjaga sepanjang tahun, sehingga kendala pada komoditas tertentu tidak berdampak signifikan terhadap total produksi. Selain itu, pengendalian dampak curah hujan tinggi terhadap produktivitas tanaman mampu menjaga kontinuitas hasil produksi.

Keberhasilan ini juga didukung oleh pembinaan teknis secara berkelanjutan kepada pekebun serta penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan, sehingga pemeliharaan tanaman, pengendalian penyakit, serta pelaksanaan panen dapat dilakukan secara konsisten sesuai siklus produksi.

Untuk menjaga stabilitas produksi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan melakukan pembinaan teknis dan monitoring rutin terhadap kelompok tani perkebunan, termasuk pendampingan pemeliharaan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, serta penyesuaian jadwal panen pada kondisi cuaca yang kurang mendukung.

Sebagai bentuk implementasi pembinaan tersebut, kegiatan monitoring lapangan dan pendampingan teknis dilaksanakan secara rutin untuk memastikan kondisi tanaman tetap optimal. Dokumentasi kegiatan disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.27

Monitoring dan pembinaan teknis kepada petani kebun kopi dan karet

Sumber : Bidang Perkebunan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, dilakukan fasilitasi pelatihan budidaya dan penguatan kelembagaan pekebun guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan keberlanjutan usaha tani.



Gambar 3.28

Pelatihan budidaya tanaman perkebunan (karet) dan penguatan kelembagaan kelompok tani.

Sumber : Penyuluh Pertanian DKP3 Kota Balikpapan

Pendampingan pengendalian hama dan penyakit tanaman juga dilakukan secara intensif, termasuk penyesuaian jadwal panen pada kondisi cuaca ekstrem, sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.



Gambar 3.29

Pendampingan pengendalian penyakit tanaman perkebunan
Sumber : Penyuluh Pertanian DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, koordinasi dalam pengelolaan hasil panen dan pemasaran produk perkebunan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan motivasi pekebun, serta mendorong keberlanjutan produksi.



Gambar 3.30

Fasilitasi pertemuan petani kopi dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, DKP3, dan investor di BPP Karang Joang sebagai upaya penguatan pemasaran, kemitraan usaha, dan adaptasi perubahan iklim pada sektor perkebunan.

Sumber : Penyuluh Pertanian DKP3 Kota Balikpapan

Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan produksi berbasis komoditas unggulan daerah, peremajaan tanaman, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien. Selain itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan pekebun dalam aspek manajemen usaha dan akses pasar, termasuk mendorong kemitraan dan hilirisasi produk guna meningkatkan nilai tambah dan menjaga keberlanjutan produksi.

- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Peternakan Tahun 2025 sebesar 21.373,68 ton atau 102,76% dari target menunjukkan bahwa produksi peternakan berada pada kondisi stabil dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan produk peternakan pada periode tertentu, seperti Ramadan–Idulfitri, Maulid Nabi, akhir tahun, serta musim hajatan, yang mendorong peningkatan pemotongan dan distribusi produk peternakan. Lonjakan permintaan musiman tersebut

memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian produksi secara kumulatif sepanjang tahun. Selain itu, pelaku usaha peternakan mampu menjaga populasi ternak dan kesiapan produksi sehingga fluktuasi permintaan tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan pasokan.

Dalam mendukung stabilitas produksi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan telah melakukan pengaturan suplai ternak melalui koordinasi dengan pelaku usaha, pemantauan stok dan harga, serta pembinaan teknis kepada peternak guna memastikan ketersediaan ternak potong tetap terjaga pada periode puncak permintaan. Monitoring populasi dan siklus pemeliharaan juga dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya kekosongan pasokan pada periode berikutnya.

Sebagai bentuk implementasi pembinaan dan pengawasan, kegiatan monitoring lapangan dan pendampingan teknis kepada peternak dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagaimana didokumentasikan pada gambar berikut.



Gambar 3.31

Pemeriksaan kesehatan ternak ayam petelur oleh dokter hewan di kandang ayam Kodam VI Transad Manggar, disertai monitoring populasi ternak dan pembinaan teknis kepada peternak

Sumber : Bidang Kehewan dan Peternakan DKP3 Kota Balikpapan

Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan usaha peternakan dalam menyesuaikan fluktuasi permintaan, dilakukan pembinaan manajemen usaha ternak, penguatan kelembagaan kelompok, serta pendampingan teknis terkait pakan, kesehatan hewan, dan pengelolaan produksi. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas produksi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha peternakan.



Gambar 3.32

Kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan hijauan pakan ternak serta pencegahan dan pengendalian penyakit ternak yang dilaksanakan di BPP Teritip (28 April 2025) dan BPP Karang Joang (29 April 2025).

Sumber : Bidang Kehewan dan Peternakan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan, dilakukan promosi konsumsi produk hewani, pengawasan keamanan pangan asal hewan, serta pengendalian kesehatan hewan melalui pelayanan kesehatan dan pemeriksaan produk.



Gambar 3.33

Kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan produk, serta pengawasan keamanan pangan asal hewan, termasuk pengawasan produk pangan asal hewan menjelang Hari Besar Keagamaan

Sumber : Bidang Kehewan dan Peternakan DKP3 Kota Balikpapan

Kedepan, diperlukan penguatan perencanaan produksi berbasis kalender permintaan musiman, pengembangan sistem logistik dan cadangan ternak, serta peningkatan kapasitas manajemen usaha peternakan. Selain itu, diversifikasi produk olahan hasil ternak dan penguatan pemasaran berbasis nilai tambah perlu terus didorong agar konsumsi masyarakat lebih merata sepanjang tahun dan tidak hanya bergantung pada momentum tertentu.

- Capaian indikator Total Produksi Sub Sektor Perikanan Tahun 2025 sebesar 5.942,30 ton atau 123,49% dari target menunjukkan bahwa produksi perikanan berada pada kategori melebihi target. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) serta bertambahnya armada penangkapan pada awal tahun yang bertepatan dengan musim penangkapan. Kondisi tersebut mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap secara signifikan. Selain itu, bertambahnya Rumah Tangga Pembudidaya serta diversifikasi komoditas, termasuk pengembangan budidaya rumput laut air payau (*Gracilaria*), turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi, khususnya pada triwulan II dan III. Meskipun pada triwulan IV terjadi penurunan aktivitas melaut akibat kondisi cuaca, peningkatan produksi budidaya mampu menjaga stabilitas produksi secara keseluruhan sehingga target tahunan tetap terlampaui.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan melaksanakan berbagai upaya, antara lain pembinaan teknis kepada nelayan dan pembudidaya, fasilitasi sarana penangkapan dan budidaya, serta pendataan dan monitoring RTP secara berkala guna memastikan kapasitas produksi tetap terjaga. Selain itu, dilakukan penguatan diversifikasi komoditas, pendampingan teknis budidaya, serta pengembangan komoditas potensial guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha perikanan.



Gambar 3.34

Penyerahan dan fasilitasi sarana perikanan tangkap berupa mesin kapal kepada kelompok nelayan.

Sumber : Bidang Perikanan DKP3 Kota Balikpapan

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor budidaya, dilakukan pendampingan teknis budidaya, penguatan kapasitas pembudidaya, serta fasilitasi sarana produksi seperti pakan dan bibit ikan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan diversifikasi komoditas dan nilai tambah produk.



Gambar 3.35

Penyerahan bantuan bibit ikan nila sebanyak 2.000 ekor dari Balai Benih Ikan (BBI) Teritip kepada kelompok ISF Transad

Sumber : Bidang Perikanan DKP3 Kota Balikpapan



Gambar 3. 36

Kegiatan pelatihan diversifikasi usaha nelayan di Sentra Industri Kecil Terpadu (SIKT) Teritip

Sumber : Bidang Perikanan DKP3 Kota Balikpapan



Gambar 3. 37

Kolaborasi kegiatan peningkatan kualitas dan mutu hasil perikanan bersama BP2MHKP, pengecekan administrasi usaha pembudidaya oleh PSDKP, layanan Gerai Pelangi oleh penyuluh perikanan, serta penguatan keberlanjutan kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pembudidaya ikan DKP3 Kota Balikpapan

Sumber : Bidang Perikanan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, monitoring kondisi cuaca dan pembinaan keselamatan melaut terus dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong keseimbangan antara produksi tangkap dan budidaya agar sektor perikanan lebih adaptif dan berkelanjutan.



Gambar 3.38

Kegiatan sosialisasi keselamatan dan keamanan di anjungan lepas pantai PT.

Pertamina Hulu Kaltim kepada nelayan

Sumber : Bidang Perikanan DKP3 Kota Balikpapan



Gambar 3.39

Kegiatan koordinasi, komunikasi sosial, dan kolaborasi terkait pengamanan dan keselamatan laut (PAM KAMLA) antara DKP3 Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Klandasan

Sumber : Bidang Perikanan DKP3 Kota Balikpapan

Ke depan, diperlukan penguatan manajemen usaha nelayan melalui peningkatan akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi tangkap ramah lingkungan, serta pengembangan sistem pencatatan produksi yang lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, penguatan hilirisasi produk melalui peningkatan kualitas pascapanen, pengembangan rantai pasok, dan kemitraan pemasaran menjadi prioritas guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Capaian indikator Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025 sebesar 82,24 poin atau 100,66% dari target menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah berada pada kategori melebihi target dan mampu mempertahankan predikat A. Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan pelaporan, sehingga indikator kinerja semakin terukur dan selaras dengan tujuan strategis. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala memungkinkan identifikasi deviasi secara dini dan percepatan tindak lanjut.

Upaya yang telah dilakukan meliputi reviu internal dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, penyempurnaan cascading kinerja hingga level pelaksana, penguatan koordinasi lintas bidang, serta pemantauan realisasi fisik dan keuangan secara periodik. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan dan penguatan budaya kerja berbasis kinerja juga menjadi faktor pendukung keberhasilan.

Ke depan, diperlukan penguatan integrasi perencanaan berbasis outcome, peningkatan kualitas indikator kinerja yang berorientasi pada dampak, serta pengembangan sistem monitoring berbasis digital guna menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sehubungan dengan Tahun 2025 merupakan masa transisi antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029, maka analisis kinerja pada subbab sebelumnya disusun berdasarkan indikator dan sasaran strategis pada Renstra Tahun 2021–2026 yang masih memiliki data historis lengkap. Selanjutnya, analisis

pada subbab ini mengacu pada Renstra Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan terbaru untuk memberikan gambaran posisi capaian kinerja pada tahun awal implementasi periode baru sekaligus sebagai baseline pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Adapun analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, maupun penurunan kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan /Prevalency Of Undernourishment (PoU)	Persen	5,67	8,24	68,81%	1. Sebagian rumah tangga berpendapatan rendah masih mengalami keterbatasan daya beli, terutama saat terjadi kenaikan harga pangan tertentu, sehingga konsumsi energi tidak mencukupi standar kebutuhan minimum.	Telah dilakukan intervensi melalui program bantuan pangan, operasi pasar, serta penguatan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.	Perlu penguatan perlindungan sosial berbasis data rumah tangga rentan, peningkatan efektivitas subsidi atau bantuan pangan tepat sasaran, serta sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan.
							2. Sebagian masyarakat telah beralih ke pola konsumsi yang lebih beragam, namun pada kelompok rentan masih terjadi ketidakseimbangan antara keberagaman dan kecukupan energi	Dilaksanakan edukasi konsumsi pangan B2SA dan sosialisasi kecukupan energi di tingkat keluarga serta kelompok masyarakat.	Perlu penguatan edukasi berbasis praktik penyusunan menu hemat namun padat energi, serta pendampingan intensif pada wilayah dengan tingkat kerawanan pangan lebih tinggi.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							total, sehingga asupan harian belum memenuhi standar minimal.		
							3. Fluktuasi harga pangan strategis dan gangguan distribusi pada periode tertentu memengaruhi kemampuan rumah tangga rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara stabil sepanjang tahun.	Dilakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan secara rutin, serta koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas pasokan.	Perlu penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, pengembangan lumbung pangan masyarakat, serta sistem peringatan dini kerawanan pangan agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	87,35	90,85	104,01%	1. Terjadi peningkatan konsumsi pada kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah sehingga skor PPH meningkat signifikan. Perubahan ini menunjukkan	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman), lomba cipta menu pangan lokal, serta promosi olahan pangan lokal pada berbagai kegiatan daerah.	Perlu penguatan edukasi berbasis praktik (demo masak, kelas menu hemat bergizi), serta integrasi kampanye B2SA dengan program sekolah, PKK, dan dasawisma agar perubahan pola konsumsi menjadi kebiasaan jangka

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							pergeseran dari dominasi padi-padian menuju pola konsumsi yang lebih beragam.		panjang, bukan sekedar tren sesaat.
							2. Pertumbuhan ekonomi yang positif serta inflasi yang terkendali meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga akses terhadap pangan hewani, buah dan sayur menjadi lebih baik.	Pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi TPID serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin untuk menjaga keterjangkauan harga.	Perlu penguatan intervensi khusus pada kuintil 1 dan 2 (kelompok rentan), karena berdasarkan data, skor PPH mereka masih di bawah 90. Program GPM dan subsidi pangan sebaiknya lebih terarah pada wilayah kantong rentan agar peningkatan skor lebih merata.
							3. Kontribusi skor dari kelompok sayur dan buah serta pangan hewani sudah mendekati skor maksimal, namun kelompok umbi-umbian dan	Promosi konsumsi pangan lokal non-beras melalui pameran, lomba inovasi pangan, dan kampanye diversifikasi pangan.	Perlu pengembangan rantai pasok dan hilirisasi produk umbi serta kacang lokal agar lebih menarik, praktis, dan kompetitif. Selain itu, mendorong substitusi sebagian konsumsi beras dengan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							kacang-kacangan masih belum optimal dibandingkan skor idealnya.		sumber karbohidrat lokal dalam kegiatan pemerintahan (rapat, snack box, event resmi) agar menjadi contoh nyata.
							4. Skor PPH meningkat secara agregat, namun masih terdapat ketimpangan. Kuintil 1 dan 2 memiliki skor PPH masing-masing 74,76 dan 83,66, di bawah kategori konsumsi beragam dan seimbang.	Pelaksanaan edukasi B2SA dan GPM yang terbuka untuk masyarakat luas, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.	Perlu intervensi lebih spesifik berbasis kuintil, seperti edukasi menu hemat bergizi berbasis bahan lokal murah, urban farming skala rumah tangga, serta kolaborasi dengan program pengentasan kemiskinan agar peningkatan kualitas konsumsi tidak hanya terjadi pada kelompok menengah ke atas.
							5. Meskipun skor PPH meningkat, konsumsi energi rata-rata mengalami penurunan dan masih di bawah	Kampanye gizi seimbang dan peningkatan konsumsi sumber energi alternatif seperti umbi-umbian.	Perlu penyeimbangan antara peningkatan kualitas dan kecukupan energi, terutama bagi kelompok rentan, agar peningkatan skor PPH

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							standar AKE. Artinya, kualitas pola makan membaik, tetapi kuantitas energi belum optimal.		tidak diikuti risiko defisit energi. Intervensi harus memastikan kecukupan energi minimal tercapai sebelum mendorong diversifikasi lanjutan.
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,7	82,24	100,66%	1. Terjadi peningkatan konsistensi antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan pelaporan, sehingga indikator kinerja lebih terukur dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.	Dilakukan revidi internal terhadap dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta penyempurnaan cascading kinerja hingga level eselon dan pelaksana.	Perlu penguatan integrasi perencanaan berbasis outcome dan peningkatan kualitas indikator agar lebih fokus pada dampak, bukan hanya output kegiatan.
							2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik memungkinkan identifikasi deviasi capaian lebih dini, sehingga dapat	Telah dilaksanakan rapat evaluasi berkala, pemantauan realisasi fisik dan keuangan, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih sistematis dan berbasis data.	Perlu pengembangan sistem monitoring berbasis digital/dashboard kinerja agar proses evaluasi lebih cepat, akurat, dan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							dilakukan langkah korektif sebelum akhir tahun anggaran.		terdokumentasi dengan baik.
							3. Adanya komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh unit kerja dalam penerapan SAKIP mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, sehingga perangkat daerah berhasil meraih predikat A.	Dilakukan pembinaan internal, koordinasi lintas bidang, serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap implementasi SAKIP.	Perlu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis penyusunan indikator dan analisis kinerja, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja agar capaian predikat A dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Tujuan Strategis : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Capaian indikator tujuan Strategis yaitu Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Tahun 2025 sebesar 68,81% belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan inflasi pangan sepanjang tahun 2025, khususnya pada komoditas beras, telur, cabai, dan bahan pangan strategis lainnya yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Kenaikan harga pada periode tertentu menyebabkan rumah tangga rentan melakukan penyesuaian konsumsi, baik dari sisi jumlah maupun kualitas pangan, sehingga kecukupan energi belum optimal. Selain itu, perubahan pola konsumsi menuju pangan beragam belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan total asupan energi, terutama pada kelompok rentan.

Dalam rangka menekan dampak inflasi terhadap ketahanan pangan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan melaksanakan intervensi stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penguatan distribusi pangan strategis. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Perum Bulog, dan perangkat daerah terkait untuk menjaga keterjangkauan pangan dan mengendalikan tekanan inflasi.



Gambar 3.41

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa di halaman Kantor DPOP, serta pada hari Sabtu dan Minggu di Taman Bekapai dan Taman Tiga Generasi

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, intervensi dilakukan secara lebih terarah melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan kelompok sasaran prioritas, khususnya rumah tangga pada desil 1 dan desil 2 serta keluarga risiko stunting. Pendekatan berbasis data ini memastikan program bantuan pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) lebih tepat sasaran, sehingga mampu

memperkuat akses pangan masyarakat dan mengurangi risiko kerawanan pangan pada periode tekanan inflasi.



Gambar 3.42

Penyaluran CPPD dan bantuan pangan kepada rumah tangga sasaran

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Dalam rangka menjaga kualitas konsumsi, edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) terus diperkuat melalui sosialisasi di sekolah, komunitas, dan kelompok masyarakat, serta integrasi dengan program percepatan penurunan stunting. Edukasi ini difokuskan pada pemanfaatan pangan lokal yang lebih terjangkau sebagai strategi adaptasi rumah tangga terhadap fluktuasi harga pangan.



Gambar 3.43

Sosialisasi B2SA sebagai strategi perubahan perilaku konsumsi dan adaptasi terhadap inflasi pangan.

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, dilakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan secara rutin melalui koordinasi lintas sektor dalam forum TPID, penyusunan peta kerentanan

pangan, serta penguatan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi potensi lonjakan inflasi pangan. Pendekatan ini meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.



Gambar 3.44

Monitoring harga pangan dan koordinasi TPID dalam pengendalian inflasi daerah.

Ke depan, diperlukan penguatan sinergi program stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengembangan cadangan pangan berbasis komoditas lokal, serta integrasi intervensi ketahanan pangan dengan program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menurunkan PoU

secara lebih signifikan melalui peningkatan akses, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau

Berdasarkan Tabel 3.13, capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 sebesar 90,85 atau 104,01% dari target menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Balikpapan semakin beragam dan bergizi. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai beralih dari dominasi padi-padian menuju konsumsi pangan yang lebih beragam, khususnya pada kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas intervensi perubahan perilaku konsumsi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Salah satu kegiatan yang paling berpengaruh adalah pelaksanaan edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang dilakukan secara masif di berbagai kelompok masyarakat, mulai dari sekolah, komunitas, hingga kegiatan daerah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan praktik konsumsi secara langsung melalui demo menu, lomba inovasi pangan lokal, dan kampanye diversifikasi pangan.



Gambar 3.45

Sosialisasi dan edukasi B2SA di sekolah.

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Selain itu, kegiatan lomba cipta menu pangan lokal dan promosi olahan pangan berbasis bahan lokal turut meningkatkan minat masyarakat dalam mengonsumsi pangan non-beras. Kegiatan ini memperkuat diversifikasi konsumsi sekaligus mendukung pengembangan pangan lokal sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.



Gambar 3.46

Lomba cipta menu B2SA dan promosi olahan pangan lokal.

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Peningkatan skor PPH juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah yang relatif stabil serta inflasi pangan yang terkendali, sehingga daya beli masyarakat terhadap pangan hewani, buah, dan sayur meningkat. Pengendalian inflasi melalui koordinasi TPID serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin berkontribusi menjaga keterjangkauan harga pangan dan akses masyarakat terhadap pangan bergizi.



Gambar 3.47

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi.

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Namun demikian, peningkatan skor PPH secara agregat masih diikuti kesenjangan antar kelompok pendapatan. Skor PPH pada kuintil 1 dan 2 masih berada di bawah kategori konsumsi beragam dan seimbang, sehingga diperlukan intervensi yang lebih spesifik pada kelompok rentan. Selain itu, meskipun kualitas pola makan meningkat, konsumsi energi rata-rata masih di bawah standar Angka Kecukupan Energi (AKE). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas konsumsi belum sepenuhnya diimbangi dengan kecukupan energi.

Sebagai respons, intervensi mulai diarahkan pada pendekatan berbasis kuintil melalui edukasi menu hemat bergizi, urban farming skala rumah tangga, serta

DOKUMENTASI KEGIATAN



integrasi dengan program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Selain itu, promosi pangan lokal sumber energi seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan terus diperkuat agar keseimbangan antara kualitas dan kuantitas konsumsi dapat tercapai.

Gambar 3.48

Edukasi menu hemat bergizi dan pemanfaatan pangan lokal pada kelompok rentan.

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Balikpapan

Ke depan, diperlukan penguatan perubahan perilaku konsumsi berbasis praktik, pengembangan rantai pasok pangan lokal, serta integrasi kampanye B2SA dengan program sekolah, PKK, dan dasawisma. Pendekatan ini diharapkan mampu

menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas konsumsi sekaligus menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada Tahun 2025, sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 memiliki keselarasan dengan sasaran keempat pada Renstra Tahun 2021–2026, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kesamaan fokus tersebut menunjukkan keberlanjutan arah kebijakan dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, meskipun terjadi penyesuaian struktur sasaran strategis pada dokumen perencanaan periode terbaru.

Capaian indikator Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025 sebesar 82,24 poin atau 100,66% dari target menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah berada pada kategori melebihi target dan mampu mempertahankan predikat A. Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan pelaporan, sehingga indikator kinerja semakin terukur dan selaras dengan tujuan strategis. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala memungkinkan identifikasi deviasi secara dini serta percepatan tindak lanjut terhadap capaian yang belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan meliputi reviu internal dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, penyempurnaan cascading kinerja hingga level pelaksana, penguatan koordinasi lintas bidang, serta pemantauan realisasi fisik dan keuangan secara periodik. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan internal dan penguatan budaya kerja berbasis kinerja juga menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga konsistensi implementasi SAKIP.

Ke depan, diperlukan penguatan integrasi perencanaan berbasis outcome, peningkatan kualitas indikator kinerja yang berorientasi pada dampak, serta pengembangan sistem monitoring berbasis digital guna menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pendekatan ini

diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara berkelanjutan.

3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel. 3. 14 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PKKP) / Prevalency of Undernourishment (PoU)	145,33 %					
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	90,07%	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	102,08 %	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	0,11	0,27	245,45%
							Kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	14,00	12,61	90,07%
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	65,00	100,00	153,85%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1,00	1,00	100,00%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	94,06%				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	0,11	0,27	245,45%
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	111,05%				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan konsumsi pangan umbi-umbian	40,00	45,33	113,33%
		Persentase Keamanan Pangan	109,71%				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	90,00	98,75	109,72%
							Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas)	90,00	98,75	109,72%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
								yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa			
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	95,16%				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	30,00	45,00	150,00%
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	40,94%				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian	100,00	100,00	100,00%
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	107,68%				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85,00	119,00	140,00%
							Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	4,00	9,00	225,00%
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	55,00	123,16	223,93%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							GAN BENCANA PERTANIAN				
							Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	300,00	369,00	123,00%
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	55,00	70,42	128,04%
							Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	umlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan	1000,00	1617,00	161,70%
		Total Produksi Sub Sektor Pternakan	102,76%				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	30,00	45,00	150,00%
							Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu	280,00	288,00	102,86%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85,00	119,00	140,00%
							Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab	3,00	3,00	100,00%
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan	65,00	100,00	153,85%
							Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian	50,00	50,00	100,00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	80,00	100,00	125,00%
							Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hewan yang dilayani	3450,00	10506,00	304,52%
							Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet	26,00	27,00	103,85%
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	123,49%				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	4500,00	5170,40	114,90%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan	64,00	64,00	100,00%
							Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	100,00	100,00	100,00%
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	312,00	770,95	247,10%
							Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	130,00	130,00	100,00%
							Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	2,00	2,00	100,00%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	100,66%	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,66 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74,00	80,55	108,85%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							KABUPATEN/KOTA				
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,00	81,44	110,05%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74,00	80,31	108,53%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72,00	80,28	111,50%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,00	80,65	108,99%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,00	80,32	108,54%
Keterangan: Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021–2026 menuju Renstra Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.											

Tabel 3.14 menyajikan keterkaitan antara tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan.

Pada Renstra Tahun 2021–2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) diturunkan dari sasaran strategis, sedangkan pada Renstra Tahun 2025–2029 indikator pada tingkat tujuan strategis telah ditetapkan sebagai IKU perangkat daerah. Penyesuaian ini bertujuan memperkuat orientasi kinerja berbasis outcome, sehingga pengukuran kinerja lebih berfokus pada dampak pembangunan. Meskipun terdapat perubahan struktur indikator, program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap berkelanjutan dan relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Berdasarkan tabel tersebut, analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2021–2026 disampaikan sebagai berikut.

1) Sasaran Strategis 1: Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Indikator Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah mencapai 90,07% dari target. Capaian ini diperoleh melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota serta Program Penanganan Kerawanan Pangan melalui kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Belum optimalnya capaian dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga beras medium PSO yang berdampak pada keterlambatan proses pengadaan pada awal tahun anggaran. Selain itu, keterbatasan ketersediaan beras PSO di pasar menyebabkan penyesuaian volume pengadaan terhadap pagu anggaran. Upaya yang dilakukan meliputi penyesuaian harga melalui APBD Perubahan, optimalisasi alokasi anggaran, koordinasi intensif dengan Perum Bulog, serta diversifikasi cadangan pangan melalui pengadaan paket protein bagi kelompok prioritas. Intervensi ini juga diintegrasikan dengan program penurunan stunting dan pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman.

Indikator Tingkat Konsumsi Energi (TKE) berada pada kategori normal, Tingkat Konsumsi Protein (TKP) melebihi target, serta Persentase Keamanan Pangan menunjukkan capaian sangat baik. Capaian ini didukung oleh Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), kampanye diversifikasi pangan lokal, peningkatan konsumsi protein hewani melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), serta pemantauan pola konsumsi pangan masyarakat secara berkala. Selanjutnya, indikator keamanan pangan didukung oleh Program Pengawasan Keamanan Pangan melalui kegiatan pengawasan pangan segar asal tumbuhan, pelaksanaan sampling dan pengujian menggunakan rapid test kit, penguatan koordinasi dengan laboratorium penguji, serta pembinaan pelaku usaha dalam pemenuhan standar keamanan pangan.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan

Capaian indikator produksi relatif baik pada sebagian besar subsektor. Produksi tanaman pangan didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, serta Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian melalui bantuan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyuluhan intensif, serta optimalisasi lahan. Produksi hortikultura masih belum optimal akibat alih fungsi lahan, faktor iklim, dan regenerasi petani yang terbatas. Namun, intervensi tetap dilakukan melalui intensifikasi lahan terbatas, pengembangan pekarangan, dan peningkatan kapasitas petani. Produksi perkebunan menunjukkan kinerja baik melalui pembinaan teknis, penguatan kelembagaan, serta pelatihan budidaya dan pemasaran. Produksi peternakan didukung oleh Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui pelayanan kesehatan hewan, pengawasan produk asal hewan, serta peningkatan biosekuriti. Produksi perikanan didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melalui fasilitasi sarana prasarana, pemberdayaan nelayan dan

pembudidaya, serta penguatan kemitraan usaha. Keberhasilan sektor produksi juga dipengaruhi oleh faktor lintas subsektor, antara lain penyuluhan intensif, inovasi Brigade Alsintan, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, serta dukungan sarana prasarana produksi.

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Nilai SAKIP mencapai 100,66% dan mampu mempertahankan predikat A. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya penguatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, pengukuran berbasis outcome, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Implementasi cascading kinerja, reviu internal, dan penguatan koordinasi lintas bidang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas perangkat daerah.

Selanjutnya, capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029 disampaikan sebagai berikut.

Tujuan Strategis : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) belum mencapai target dengan capaian sebesar 68,81%. Capaian ini dipengaruhi oleh tekanan inflasi pangan, fluktuasi harga komoditas strategis, serta keterlambatan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, tujuan strategis ini didukung oleh seluruh program dan kegiatan pada urusan pangan, pertanian, dan perikanan yang berfokus pada stabilisasi pasokan, peningkatan produksi, penguatan konsumsi, serta perlindungan kelompok rentan.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan capaian melebihi target sebesar 102,08%. Capaian ini didukung oleh integrasi program peningkatan kualitas konsumsi, stabilisasi harga, edukasi gizi, serta penguatan produksi dan distribusi pangan lokal yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pola konsumsi masyarakat.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah mencapai 100,66% dan melebihi target. Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

3.2.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluran i (kolom 6)

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN	89,00	90,85	102,08%	Rp 30.499.997.750,00	Rp 26.337.556.211,04	86,35%	15,41%	Efisien
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Persen	APBD	14%	12,61%	90,07%	Rp 620.661.210	Rp 598.128.551	96,37%	-6,99%	-
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	Persen	APBD	95%	89%	94,06%	Rp 187.224.187,5	Rp 180.430.234,00	96,37%	-2,45%	Efisien
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	Persen	APBD	100%	111%	111,05%					
		Persentase Keamanan Pangan	Persen	APBD	90%	99%	109,71%	Rp 282.573.750	Rp 261.428.155	92,52%	15,67%	Efisien
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor	Ton	APBD Kota dan APBN	18.000	17128,00	95,16%	Rp 2.111.241.370	Rp 1.939.236.645,44	91,85%	-34,98%	-

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
		Tanaman Pangan										
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Ton	APBD	140.000	57321,24	40,94%					
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	Ton	APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN	10.809	11638,69	107,68%	Rp 1.202.678.910	Rp 1.116.088.713	92,80%	13,82%	Efisien
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	APBD	20.800	21373,68	102,76%	Rp 1.701.396.921	Rp 1.481.829.616,35	87,09%	0,152427885	Efisien
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	APBD	4.812	5942,30	123,49%	Rp 1.997.944.383	Rp 1.752.841.186,25	87,73%	28,96%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Poin	APBD	81,70	82,24	100,66%	Rp 22.396.277.018,5	Rp 19.007.573.110	84,87%	15,69%	Efisien
Keterangan:												
1. Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021–2026 dan Renstra Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;												

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Targe t	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
2.	Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;											
3.	Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.											

Berdasarkan Tabel 3.14, analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar capaian kinerja telah sejalan dengan tingkat penyerapan anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat dinilai relatif efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hal ini terlihat dari indikator yang mampu melampaui target meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, yang mencerminkan optimalisasi belanja berbasis kebutuhan riil dan pengendalian biaya dalam pelaksanaan program. Secara rinci, efisiensi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Indikator Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah mencapai 90,07% dengan penyerapan anggaran 96,37%, sehingga belum dapat dinilai efisien karena capaian kinerja belum memenuhi target. Kondisi ini dipengaruhi dinamika kebijakan harga beras nasional, keterlambatan pengadaan, serta keterbatasan ketersediaan beras PSO. Meskipun demikian, pengelolaan anggaran tetap optimal melalui penyesuaian harga pada APBD Perubahan, koordinasi intensif dengan Perum Bulog, serta penguatan diversifikasi cadangan pangan.

2. Sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman

Indikator keamanan pangan mencapai 109,71% dengan penyerapan anggaran 92,52% dan efisiensi sebesar 15,67%. Efisiensi tersebut terjadi karena optimalisasi pelaksanaan pengawasan keamanan pangan melalui sampling berbasis risiko, penggunaan rapid test kit secara efektif, serta koordinasi laboratorium penguji. Sementara indikator TKE dan TKP juga menunjukkan kinerja baik melalui pendekatan edukasi gizi dan intervensi konsumsi pangan berbasis masyarakat.

3. Sasaran Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan

Efisiensi anggaran terlihat pada sebagian besar sub sektor produksi.

- Produksi perkebunan mencapai 107,68% dengan penyerapan 92,80% dan efisiensi 13,82%, didukung pembinaan teknis dan stabilitas komoditas unggulan.

- Produksi peternakan mencapai 102,76% dengan penyerapan 87,09%, menunjukkan efektivitas program kesehatan hewan dan peningkatan biosekuriti.
- Produksi perikanan mencapai 123,49% dengan penyerapan 87,73% dan efisiensi 28,96%, yang dipengaruhi peningkatan produktivitas budidaya dan pemberdayaan nelayan.
- Namun demikian, produksi tanaman pangan dan hortikultura belum optimal akibat faktor iklim, keterbatasan lahan, serta regenerasi petani yang masih terbatas.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Nilai SAKIP mencapai 100,66% dengan penyerapan anggaran 84,87% dan efisiensi 15,69%. Efisiensi ini dipengaruhi penguatan perencanaan berbasis outcome, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi tanpa penambahan belanja signifikan.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Tahun 2025 telah cukup efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian sebagian besar indikator kinerja. Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum optimal, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika kebijakan nasional, inflasi pangan, serta perubahan iklim. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan berbasis risiko, fleksibilitas penganggaran, serta peningkatan sinergi lintas sektor agar efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dapat terus ditingkatkan.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Penyerapan anggaran belanja pada Tahun 2025 mencapai sebesar 86,35% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PERikanan
Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Sasaran 1 : Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 569.513.160	Rp 548.522.360	96,31%
	Kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 569.513.160	Rp 548.522.360	96,31%
	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 569.513.160	Rp 548.522.360	96,31%
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 51.148.050	Rp 49.606.191	96,99%
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 51.148.050	Rp 49.606.191	96,99%
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp 51.148.050	Rp 49.606.191	96,99%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 187.224.188	Rp 180.430.234	96,37%
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 187.224.188	Rp 180.430.234	96,37%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 187.224.188	Rp 180.430.234	96,37%
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 282.573.750	Rp 261.428.155	92,52%
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Rp 282.573.750	Rp 261.428.155	92,52%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 282.573.750	Rp 261.428.155	92,52%
	Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 894.975.245	Rp 848.980.781	94,86%
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 894.975.245	Rp 848.980.781	94,86%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 666.378.600	Rp 628.405.130	94,30%
	Sub Kegiatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 228.596.645	Rp 220.575.651	96,49%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 1.161.266.125	Rp 1.036.825.864	89,28%
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.161.266.125	Rp 1.036.825.864	89,28%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp 500.000.000	Rp 422.604.094	84,52%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp 661.266.125	Rp 614.221.770	92,89%
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 55.000.000	Rp 53.430.000	97,15%
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Rp 55.000.000	Rp 53.430.000	97,15%
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 227.076.610	Rp 211.442.910	93,12%
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 227.076.610	Rp 211.442.910	93,12%
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	Rp 227.076.610	Rp 211.442.910	93,12%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Pangan,Hortikultura dan Perkebunan			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 975.602.300	Rp 904.645.803	92,73%
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 975.602.300	Rp 904.645.803	92,73%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 200.000.000	Rp 157.707.768	78,85%
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 204.903.750	Rp 187.827.050	91,67%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp 454.987.775	Rp 444.525.985	97,70%
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 47.310.775	Rp 46.185.000	97,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Rp 68.400.000	Rp 68.400.000	100,00%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 75.510.228	Rp 69.064.513	91,46%
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 75.510.228	Rp 69.064.513	91,46%
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp 75.510.228	Rp 69.064.513	91,46%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 865.000.000	Rp 683.097.953	78,97%
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 865.000.000	Rp 683.097.953	78,97%
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rp 865.000.000	Rp 683.097.953	78,97%
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 741.515.443	Rp 710.740.048	95,85%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rp 482.439.720	Rp 465.116.056	96,41%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp 482.439.720	Rp 465.116.056	96,41%
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Rp 259.075.723	Rp 245.623.992	94,81%
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rp 259.075.723	Rp 245.623.992	94,81%
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp 19.371.250	Rp 18.927.102	97,71%
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.371.250	Rp 18.927.102	97,71%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 19.371.250	Rp 18.927.102	97,71%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 563.771.580	Rp 472.924.383	83,89%
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp 259.814.300	Rp 199.220.061	76,68%
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp 141.566.800	Rp 123.716.983	87,39%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp 118.247.500	Rp 75.503.078	63,85%
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp 303.957.280	Rp 273.704.322	90,05%
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp 303.957.280	Rp 273.704.322	90,05%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 1.434.172.803	Rp 1.279.916.803	89,24%
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 205.389.485	Rp 176.610.300	85,99%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Rp 57.437.500	Rp 40.925.150	71,25%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Rp 147.951.985	Rp 135.685.150	91,71%
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 1.228.783.318	Rp 1.103.306.503	89,79%
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.800.000	Rp 33.600.000	99,41%
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.146.369.318	Rp 1.023.334.143	89,27%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Rp 48.614.000	Rp 46.372.360	95,39%
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 22.396.277.019	Rp 19.007.573.110	84,87%
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp 17.826.137.400	Rp 15.297.071.128	85,81%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 17.826.137.400	Rp 15.297.071.128	85,81%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 749.401.836	Rp 690.230.118	92,10%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 36.120.000	Rp 35.039.370	97,01%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 87.237.570	Rp 73.694.250	84,48%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 400.591.698	Rp 359.034.000	89,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 34.838.055	Rp 31.855.000	91,44%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 190.614.513	Rp 190.607.498	100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.123.343.800	Rp 1.809.082.295	85,20%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 299.798.000	Rp 203.250.205	67,80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.816.545.800	Rp 1.598.832.090	88,01%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.355.492.000	Rp 926.191.119	68,33%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.090.194.000	Rp 693.610.819	63,62%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 265.298.000	Rp 232.580.300	87,67%
	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 341.901.983	Rp 284.998.450	83,36%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 341.901.983	Rp 284.998.450	83,36%
	Total	Rp 30.499.997.750	Rp 26.337.556.211	86,35%

Sumber : Data Diolah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (2026)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, kinerja Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan secara umum menunjukkan tren yang positif jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Tahun 2021–2026 maupun Renstra Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada kedua dokumen tersebut secara berkelanjutan.

Pada periode Renstra Tahun 2021–2026, indikator kinerja utama sebagian besar diturunkan dari sasaran strategis, sedangkan pada Renstra Tahun 2025–2029 indikator tujuan strategis, khususnya Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU), telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Hal ini menunjukkan adanya penguatan orientasi kinerja pada outcome dan dampak pembangunan ketahanan pangan.

Pada tujuan strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan dalam Renstra Tahun 2025–2029, indikator PoU Tahun 2025 belum mencapai target dengan capaian sebesar 68,81%. Capaian ini menunjukkan bahwa tantangan akses dan keterjangkauan pangan beragam masih perlu diperkuat, terutama pada kelompok rentan. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, intervensi ketahanan pangan telah lebih terintegrasi melalui stabilisasi pasokan, pengendalian inflasi pangan, serta pemetaan kerawanan pangan, namun dampaknya terhadap penurunan PoU masih memerlukan penguatan.

Pada sasaran strategis Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, capaian Tahun 2025 sebesar 12,61% atau 90,07% dari target. Jika dibandingkan dengan periode Renstra Tahun 2021–2026, capaian ini menunjukkan keberlanjutan penguatan cadangan pangan, meskipun masih dipengaruhi dinamika kebijakan harga nasional dan mekanisme pengadaan. Upaya penguatan koordinasi dengan Perum Bulog dan diversifikasi cadangan pangan telah menjadi pembelajaran penting dalam meningkatkan ketahanan sistem pangan daerah.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman, capaian indikator Tingkat Konsumsi Energi (TKE) berada pada kategori normal, sedangkan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) melampaui target. Indikator Persentase Keamanan Pangan juga menunjukkan capaian melebihi target. Dibandingkan periode sebelumnya, kualitas konsumsi pangan masyarakat menunjukkan tren yang semakin baik, terutama pada peningkatan konsumsi protein dan penguatan pengawasan keamanan pangan.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan, sebagian besar indikator produksi menunjukkan capaian yang baik dan stabil, terutama pada subsektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dibandingkan Renstra Tahun 2021–2026, terjadi peningkatan kontribusi produksi pada beberapa subsektor, meskipun produksi hortikultura masih menghadapi tantangan alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan regenerasi petani.

Selanjutnya, pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian Nilai SAKIP Tahun 2025 sebesar 82,24 dan mampu mempertahankan predikat A. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan penguatan reformasi birokrasi dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029, terutama dalam integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan keberlanjutan dan peningkatan kualitas kinerja dibandingkan periode sebelumnya, serta menjadi baseline penting dalam implementasi Renstra Tahun 2025–2029. Ke depan, diperlukan penguatan intervensi berbasis risiko, integrasi lintas sektor, serta fokus pada outcome dan dampak pembangunan ketahanan pangan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis secara berkelanjutan.

4.2 Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

- a. Penguatan perencanaan berbasis risiko dan data, khususnya dalam penyusunan kebutuhan cadangan pangan, pemetaan wilayah rawan pangan, serta integrasi data lintas sektor.

- b. Peningkatan efektivitas intervensi penurunan PoU, melalui penguatan perlindungan sosial, sinergi dengan program pengendalian inflasi, serta perluasan sasaran kelompok rentan.
- c. Optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, melalui diversifikasi komoditas, penyusunan skenario harga sejak awal tahun, serta penguatan koordinasi dengan Bulog dan OPD terkait.
- d. Penguatan diversifikasi konsumsi pangan, dengan tetap menjaga kecukupan energi dan protein melalui edukasi B2SA, GEMARIKAN, dan komunikasi perubahan perilaku.
- e. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui dukungan sarana prasarana, adaptasi perubahan iklim, dan penguatan kelembagaan petani dan nelayan.
- f. Penguatan pengawasan keamanan pangan berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi petugas dan integrasi sistem pelaporan.
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja berbasis outcome, melalui pengembangan dashboard kinerja, digitalisasi monitoring, serta peningkatan kapasitas SDM.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Kota Balikpapan



Ir. Sri Wahjuningsih, M.AP.